



LAPORAN KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ALTERNATIF 2025



**DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

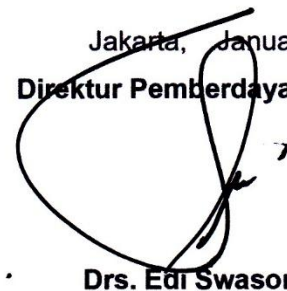
Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Pemberdayaan Alternatif (Dayatif) Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Dayatif dalam mengelola program dan kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus menjadi produk akhir dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dengan berlandaskan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif dalam mendukung tujuan strategis organisasi, serta menjadi instrumen evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

LKjIP Direktorat Pemberdayaan Alternatif disusun berdasarkan siklus anggaran tahunan, dengan mengacu pada keterkaitan yang jelas antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif melalui indikator kinerja yang terukur dan relevan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK), dan hasil Evaluasi Kinerja Kegiatan. Dengan demikian, capaian kinerja yang dilaporkan diharapkan dapat mencerminkan kontribusi nyata Direktorat Dayatif terhadap pencapaian sasaran organisasi secara keseluruhan.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Semoga LKjIP Direktorat Pemberdayaan Alternatif Tahun Anggaran 2025 ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi serta referensi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2026
Direktur Pemberdayaan Alternatif



Drs. Edi Swasono, M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	7
A. GAMBARAN UMUM	7
B. DASAR HUKUM	9
C. TUGAS POKOK FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA	12
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025	13
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN.....	15
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	38
BAB IV PENUTUP	41
A. KESIMPULAN.....	41
B. REKOMENDASI.....	41
LAMPIRAN	43
PERUBAHAN STATUS KAWASAN RAWAN NARKOBA	47

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan tahun pertama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 yang telah ditetapkan dan sebagai wujud pelaksanaan amanat yang dikandung pada visi dan misi Badan Narkotika Nasional. Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Renstra Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2025-2029, khususnya untuk Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif yaitu *Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan.*

Peningkatan upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan tersebut didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Jumlah kawasan rawan narkoba yang mengalami peningkatan derajat keterpulihan dengan target sejumlah 90 kawasan di tahun 2025 yang diukur melalui pengukuran Indeks Kawasan Rawan Narkoba (IKRN).

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TGT	CAPAI	%	Keterangan
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan narkoba yang mengalami peningkatan derajat keterpulihan	90 Kws	87 Kws	96,67	• 51 kws bahaya mjd waspada • 11 kws bahaya mjd siaga • 21 kws waspada mjd siaga • 4 kws peningkatan nilai indeks tanpa perubahan status • 9 kws dinyatakan belum pulih • 5 kws belum dilakukan pengukuran

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas bahwa realisasi Capaian Kegiatan Direktorat Dayatif TA 2025, dari target 90 Kawasan terealisasi sebanyak 87 Kawasan atau 96,67%. Peningkatan target ini tidak terlepas dari kinerja Direktorat Direktorat Pemberdayaan Alternatif dalam membangun sinergi dengan Stakeholder terkait baik K/L, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha.

Dari capaian keterpulihan kawasan rawan narkoba tercatat bahwa dari 87 kawasan yang pulih terdiri dari 51 kawasan (kws) bahaya menjadi waspada, 11 kms bahaya menjadi siaga, 21 kms waspada menjadi siaga, 4 kms peningkatan nilai indeks tanpa perubahan status 9 kms dinyatakan belum pulih, 5 kms belum dilakukan pengukuran. Total jumlah wilayah yang diintervensi 101 desa/kelurahan dimana penambahan 10 desa/kelurahan merupakan hasil sinergi stakeholder baik dari CSR/Hibah.

Dalam fasilitasi pengembangan potensi masyarakat melalui Program Alternative Development, capaian pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang mencapai 11 kelompok masyarakat (122,22%) dari target 9 kelompok masyarakat. Sementara itu, fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika mencapai 90 kelompok masyarakat (111,11%) dari target 81 kelompok masyarakat.

Pada kawasan Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba, jumlah bimbingan teknis life skill yang dilaksanakan sebanyak 95 kali dengan jumlah peserta sebanyak 2.208 orang. Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika dengan target 81 kelompok masyarakat telah tercapai 90 kelompok masyarakat dengan dengan upaya yang dilakukan sebagai berikut:

- a. 82 desa/kelurahan yang diintervensi melalui DIPA
- b. 9 desa/kelurahan yang diintervensi melalui dana hibah/CSR
- c. 4 desa/Kelurahan yang diintervensi melalui optimalisasi kegiatan DIPA

Pada kawasan Rawan Tanaman Terlarang, Fasilitasi pengembangan potensi masyarakat dengan target 9 kelompok masyarakat tercapai 11 kelompok masyarakat yang diintervensi melalui optimalisasi anggaran dengan jumlah total masyarakat yang dilatih sebanyak 330 orang. Tidak hanya program Bimtek *Life skill* saja yang dilakukan, tetapi melalui program GDAD alih budidaya komoditi alternatif pertanian dan peternakan

Faktor keberhasilan mengubah kawasan rawan didukung dengan capaian keberhasilan program pemulihan kawasan rawan narkoba, pada tahun 2021 capaian keberhasilan sejumlah 60 kawasan dari target sebesar 57 kawasan pada tahun 2022 capaian keberhasilan sejumlah 76 kawasan dari target 70 kawasan, pada tahun 2023 berjumlah 68 kawasan dari target 52 kawasan, pada tahun 2024 berjumlah 76 kawasan dari target 44 kawasan dan pada tahun 2025 berjumlah 90 kawasan dari target 87 kawasan

Pada Tahun 2025 Direktorat Pemberdayaan Alternatif juga melakukan Pengukuran Kawasan Rawan Narkoba berbasis web yang dilakukan oleh jajaran BNNP dan BNNK sebanyak 300 desa/kelurahan dan menghasilkan data update kerawanan meliputi status Bahaya 392 dan Waspada 8.938 dengan jumlah (9.330 wilayah rawan) serta status Siaga 24.485 dan Aman 11.949 dengan jumlah (36.434 wilayah tidak rawan) sehingga total desa/kelurahan yang sudah terukur berjumlah 45.764.

Hasil pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas kegiatan Bimbingan Teknis Life Skill dari target Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan sebesar 453 orang dan terealisasi 558 Orang (123,18%). Jumlah tersebut diakumulasi dari masyarakat yang masih melakukan praktek, memproduksi untuk kebutuhan keluarga, berwirausaha/dijual, bekerja di sektor formal maupun informal.

Dari aspek pengelolaan anggaran, berdasarkan pagu anggaran pasca blokir sebesar Rp 10.414.960.000,00, realisasi anggaran Direktorat Pemberdayaan Alternatif mencapai Rp 10.354.333.372,00 (99,42%)

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

UNODC Tahun 2025 melaporkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba global mencapai sekitar 296–300 juta orang, setara dengan $\pm 5,8\%$ populasi dunia usia 15–64 tahun, dan meningkat sekitar 23–34% dalam satu dekade terakhir. Ganja (cannabis) merupakan narkoba yang paling banyak digunakan secara global, dengan estimasi 244 juta pengguna pada tahun 2023, atau sekitar 4,6% populasi dunia usia 15–64 tahun. Jumlah ini meningkat sekitar 34% dalam 10 tahun terakhir.

Di tingkat nasional, hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025 menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun terakhir pakai berada pada angka 2,11%, yang berarti dari setiap 10.000 penduduk Indonesia usia 15–64 tahun terdapat sekitar 211 orang yang menyalahgunakan narkoba. Jika diestimasi secara nasional, jumlah penyalahguna narkoba setahun terakhir mencapai lebih dari 4,1 juta jiwa, dengan konsekuensi sosial, ekonomi, dan kesehatan yang signifikan, termasuk risiko kematian akibat penyalahgunaan narkoba.

Sementara itu berdasarkan hasil Survei Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pada tahun sebelumnya bulan Desember 2023, angka prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari yang semula 1,73% atau terdapat 173 penyalahgunaan narkoba dari 10.000 penduduk. Jika diestimasi jumlah pecandu setahun terakhir tersebut sebesar 3,3 juta jiwa dengan angka kematian pecandu Narkoba sebesar 30 orang per tahun. Hasil survei tersebut menunjukkan terjadi angka kenaikan angka prevalensi pecandu setahun terakhir sebesar 0,38 poin. Artinya, masih perlu effort yang tinggi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba supaya mampu menghambat laju angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN menunjukkan implementasi tingkat Pemerintah Daerah belum optimalnya hasil Inpres s/d Akhir 2024, dimana baru 57,19% kabupaten/kota yang merealisasikan Inpres tentang RAN P4GN 2020-2024 sehingga Inpres ini perlu diperpanjang 2025-2029. Pemda belum

sepenuhnya regulasi P4GN diterbitkan Kab/kota, terbukti dari hasil Inpres 2020-2024 bari 203 kab/kota dari 514 kab/kota sehingga perlu komitmen Kab/Kota untuk semua menyusun Regulasi P4GN

Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktur Pemberdayaan Alternatif atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Direktorat Pemberdayaan Alternatif. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menanggulangi bahaya narkoba, sebagaimana diketahui bersama bahwa tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah menyatukan dan menggerakkan sumber daya komponen bangsa untuk bergerak secara mandiri dan berkelanjutan melakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sehingga terwujud masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh karenanya, tugas dan fungsi Bidang Dayamas yang diemban merupakan inti dari P4GN dan garda terdepan bangsa dalam memacu peran serta aktif masyarakat dalam P4GN.

Sebagai pengemban amanah memberdayakan masyarakat anti narkoba, Kedeputan Bidang Pemberdayaan Masyarakat diberikan tugas meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN. Tugas ini ditransformasikan kepada Direktorat Pemberdayaan Alternatif untuk melakukan intervensi P4GN pada kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan.

Berkaitan hal-hal di atas, sebagai upaya membangun kinerja positif yang telah

melaksanakan tugas yang diembannya yaitu menyatukan dan menggerakkan sumber daya komponen bangsa untuk melakukan upaya P4GN, sehingga terwujud masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba disampaikan dalam bentuk capaian kinerja selama tahun 2025 yang merupakan hasil monitoring dan evaluasi Direktorat Pemberdayaan Alternatif yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; dan
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
11. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor Sprin/6193/XII/DE/PM.00/2025/BNN tanggal 29 Desember 2025 perihal kegiatan

Rapat Penyusunan Laporan Akhir Tahun Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2025 di Ruang Rapat Sudirman Lt.1 Cawang Jakarta Timur.

C. TUGAS POKOK FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Melaksanakan program P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pemberdayaan alternatif.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direktorat Pemberdayaan Alternatif memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan alternatif;
- 2) Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan alternatif;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan alternatif;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat khususnya pemberdayaan alternatif;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN khususnya pemberdayaan alternatif;
- 6) Pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan alternatif kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan alternatif.

2. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA

Sesuai dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2025-2029, maka Visi, Misi dan Tujuan Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Badan Narkotika Nasional.

Visi Badan Narkotika Nasional sebagai penerjemahan visi Presiden tidak lepas dari upaya untuk mendukung visi pembangunan nasional 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi RPJMN ini menjadi tahap pertama dari agenda pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045. Maka dari itu visi Badan Narkotika Nasional (BNN) 2025–2029 yaitu “Bersih Narkoba Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sementara itu, rumusan Misi BNN 2025–2029 adalah pengembangan dari fungsi lini BNN yang dioperasionalkan serta dikontekstualisasikan dengan Visi BNN. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan misi BNN untuk mendukung visi BNN 2025–2029 adalah:

- a. Meningkatkan rasa aman melalui kualitas rumusan dan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- b. Meningkatkan keterpulihan dan rehabilitasi bagi pengguna/penyalahguna narkoba.
- c. Mendorong tata Kelola kelembagaan yang responsif dan proaktif melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan dan transformasi digital.

1. Tujuan

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, indikator kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang dikelola Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN di Tahun 2025;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN pada tahun 2025, Untuk kemudian diharapkan mendapat masukan dalam rangka memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN;

- c. Sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam menentukan langkah-langkah strategis Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN yang akan datang.

2. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang beresiko tentang masa depan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang antisipatif dan mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan, maka Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN harus terus menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman kepada rencana strategi. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Kepala BNN untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian misi dan tujuannya serta memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*), yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi saat ini.

Rencana strategis pada Direktorat Pemberdayaan Alternatif yaitu Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan dengan indikator yaitu Jumlah kawasan rawan narkoba yang mengalami peningkatan derajat keterpulihan. Status keterpulihan suatu kawasan rawan ditentukan berdasarkan indeks kawasan rawan narkoba (IKRN) yang telah diintervensi program P4GN dibandingkan dengan IKRN pada periode sebelumnya.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan merupakan Penetapan Kinerja yang dibuat setiap tahun oleh satuan kerja suatu Lembaga. Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Penetapan Kinerja pada Direktorat Pemberdayaan Alternatif Tahun 2025 yaitu meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan dengan indikator kinerja jumlah kawasan rawan narkoba yang mengalami peningkatan derajat keterpulihan dengan target tahun 2025 yaitu sejumlah 90 kawasan.

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Secara Berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan narkoba yang mengalami peningkatan derajat keterpulihan	90 Kawasan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif T.A. 2025 memiliki sasaran kegiatan yaitu Meningkatkan upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan, dengan indikator kinerja berupa Jumlah kawasan rawan narkoba yang mengalami peningkatan derajat keterpulihan sejumlah 90 kawasan.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan narkoba yang mengalami peningkatan derajat keterpulihan	90 Kawasan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

1. Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan Direktorat Pemberdayaan Alternatif

a. Capaian Kinerja Kegiatan

Kegiatan Pemberdayaan Alternatif pada Tahun 2025 memiliki sasaran intervensi pada kawasan rawan narkoba melalui upaya pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan tersebut, dengan tujuan mendorong peningkatan keterpulihan kawasan agar menjadi produktif, mandiri, dan berkelanjutan.

Seperti dijabarkan pada bagian sebelumnya Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif tahun 2025 masih mengacu pada desain kinerja pada tahun 2024 dengan sasaran kegiatan “meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan”. Adapun indikator kinerjanya mengalami pembaruan yaitu jumlah kawasan rawan narkoba yang mengalami derajat keterpulihan dengan target 90 kawasan. Pada akhir Desember 2025 tercatat bahwa jumlah kawasan rawan narkoba yang mengalami derajat keterpulihan sebanyak 86 kawasan rawan narkoba.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif T.A 2025

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan narkoba yang mengalami peningkatan derajat keterpulihan	90 Kawasan	87 Kawasan	96,67

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2025 Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif di Kawasan Rawan Narkoba dengan target keterpulihan 90 kawasan rawan Narkoba ditentukan dari Kategori Kerawanan Bahaya/Waspada. Penentuan lokasi terpilih dalam pelaksanaan pemberdayaan alternatif berdasarkan Surat Kepala BNN Nomor : B/294/I/DE/PM.01/2025/BNN tanggal 30 Januari Tahun 2025 tentang Penyampaian Data Kerawanan Narkoba Hasil IKRN dan Verifikasi Intelijen sebagai salah satu dasar pelaksanaan upaya penanganan kawasan rawan narkoba di Lingkungan BNN.

Pelaksanaan Pemberdayaan Alternatif pada tahun 2025 ini mengacu pada buku petunjuk teknis pemberdayaan alternatif tahun 2019 baik dalam pelaksanaan kewirausahaan dan *Grand Design Alternative Development* (GDAD) di Provinsi Aceh serta Buku Petunjuk Teknis Pengukuran Kawasan Rawan Narkoba dalam mengukur derajat keterpulihan kerawanan narkoba. Berdasarkan Buku Petunjuk Teknis Pengukuran Kawasan Rawan Narkoba, dalam pengukuran Indeks Kawasan Rawan Narkoba (IKRN)terdapat 3 (tiga) Dimensi, yang diukur yaitu:

- 1) Faktor yang Memengaruhi Kerawanan Kawasan
 - a) keluarga
 - b) putus sekolah
 - c) teman sebaya
 - d) gangguan perilaku
 - e) kenakalan dan perilaku kriminal
 - f) gangguan kejiwaan
 - g) kemiskinan
- 2) Demand Reduction
 - a) Pencegahan penyalahgunaan narkoba
 - b) Pengobatan gangguan penggunaan napza
- 3) Supply Reduction
 - a) Pencegahan kejahatan narkoba
 - b) Penanggulangan peredaran gelap narkoba
 - c) Penanggulangan kejahatan terorganisir yang terkait dengan kejahatan narkoba lainnya antara lain pencucian uang, korupsi dan kegiatan kriminal lainnya

Dari 3 (tiga) dimensi tersebut, disusun instrumen kuisioner untuk dibagikan dan

dilakukan survey oleh para stakeholder meliputi 20 orang Masyarakat, 1 orang Aparatur Desa/kelurahan dan 1 orang APH dalam setiap Desa/Kelurahan. Selanjutnya dari hasil pengumpulan data kuesioner, hasilnya dihitung dan dianalisa. Hasil dari pengukuran instrument dihitung secara statistik dan hasilnya dapat dikategorikan dalam 4 interval Kriteria, yaitu: bahaya (A), Waspada (B), Siaga (C) dan Aman (D). Adapun pembagian interval nilai IKP dan kategori tingkat kemandiriannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Interval Nilai IKKR Narkoba

Nilai interval	Kategori IKRN	Kriteria pulih
1,00 - 1,60	A	Bahaya
1,61 - 2,10	B	Waspada
2,11 - 2,50	C	Siaga
2,51 - 3,50	D	Aman

Status keterpulihan kawasan rawan narkoba merupakan hasil pengukuran dari Indeks Kawasan Rawan Narkoba (IKRN). Suatu kawasan dikatakan pulih bila kawasan tersebut terjadi perubahan derajat nilai IKRN dengan interval yang sudah ditentukan, dan dapat diukur setelah dilakukan intervensi program P4GN, baik pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan dan Kerjasama.

Tabel 3.3. Keterpulihan Kawasan Rawan Narkoba

NO	STATUS AWAL	INDEKS AWAL	INDEKS AKHIR	STATUS KETERPULIHAN	STATUS AKHIR
1	Bahaya	1,00-1,20	1,21-1,40	Pulih	Bahaya
2	Bahaya	1,21-1,40	1,41-1,60	Pulih	Bahaya
3	Bahaya	1,41-1,60	1,61-1,77	Pulih	Waspada
4	Waspada	1,61-1,77	1,78-1,94	Pulih	Waspada
5	Waspada	1,78-1,94	1,95-2,10	Pulih	Waspada
6	Waspada	1,95-2,10	2,11-3,50	Pulih	Siaga/ Aman

Berdasarkan tabel sebelumnya, diketahui bahwa dari target 90 kawasan rawan narkoba, capaian keterpulihan mencapai 87 kawasan atau sebesar 96,66

persen. Dari 90 kawasan yang telah diintervensi sesuai target, sebanyak 87 kawasan dinyatakan pulih, sedangkan 3 desa/kelurahan dinyatakan belum pulih. Secara detail, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Perubahan Derajat Keterpulihan Kawasan Tahun 2025

NO	PERUBAHAN	STATUS KETERPULIHAN	JUMLAH KAWASAN
1	Bahaya ke Bahaya	pulih	2
2	Bahaya ke Waspada	pulih	51
3	Bahaya ke Siaga	pulih	11
4	Waspada ke Waspada	pulih	2
5	Waspada ke Siaga	pulih	21
6	Waspada ke Waspada	belum pulih	8
7	Siaga ke Waspada	belum pulih	1
8	Belum diukur		5
	Total		101

Secara keseluruhan, jumlah kawasan yang mendapatkan intervensi program P4GN tercatat sebanyak 101 kawasan, dengan rincian sebagai berikut: 51 kawasan mengalami perubahan status dari bahaya menjadi waspada, 11 kawasan dari bahaya menjadi siaga, 21 kawasan dari waspada menjadi siaga, 4 kawasan mengalami peningkatan nilai indeks tanpa perubahan status, 9 kawasan dinyatakan belum pulih, serta 5 kawasan belum dilakukan pengukuran keterpulihan.

Adapun faktor keberhasilan capaian ini antara lain: adanya penambahan kegiatan bimtek *life skill* yang dilaksanakan melalui sinergi kegiatan K/L, dana hibah pemerintah daerah, serta CSR dunia usaha.

b. Capaian Kinerja Rincian Output

Kegiatan pemberdayaan alternatif yang diselenggarakan secara nasional tercermin dalam tabel capaian kinerja (output) pemberdayaan alternatif Tahun 2025. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebanyak 90 kawasan yang mendapatkan intervensi penyelenggaraan pemberdayaan alternatif, sebagaimana tertuang dalam DIPA Awal yang disahkan pada bulan Desember

2024. Target tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) Rincian Output (RO):

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Rincian Output Tahun 2025

NO	RINCIAN OUTPUT	TARGET	CAPAIAN	%
1	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	9 kelompok masyarakat	11 kelompok masyarakat	122,22
2	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	81 kelompok masyarakat	90 kelompok masyarakat	111,11
3	Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberdayaan Alternatif	1 Juknis	1 Juknis	100

1) Capaian Rincian Output QDD.002

Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika (3248.QDD.002), terjadi over prestasi atas kinerja yang di awal ditargetnya sebanyak 81 kawasan intervensi, tercapai 90 kawasan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Rincian Output QDD.002

NO	SATUAN KERJA	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
1	BNNP Aceh	DIPA	Gampong Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe	Pelatihan Perbengkelan	25
2	BNNK Langsa	DIPA	Gampong Alue Dua, Kec Langsa Baro, Kota langsa	Pelatihan bengkel las	20
3	BNNP Sumut	DIPA	Desa sidorejo, kecamatan medan tembung, Kota Medan	pelatihan barbershop	15
4	BNNK Tanjungbalai	DIPA	Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar kota tanjungbalai	Budidaya ikan lele dalam ember dan tanaman hidroponik	20
5	BNNK Deli Serdang	DIPA	Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang	Kuliner	25
6	BNNK Labuhanbatu Utara	DIPA	Desa Londut, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara	Budidaya Tanaman Pepaya Kalifornia	20
7	BNNP Sumsel	DIPA	Kantor Desa Tulung Selapan Ilir, Kabupaten	Kuliner pembuatan mie,	20

NO	SATUAN KERJA	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
			Oki	Pembuatan Kerupuk dan terasi udang, aneka roti	
8	BNNP Sumbar	DIPA	Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan lubuk begalung, Kota Padang	kuliner	20
9	BNNK Solok	DIPA	Nagari Koto Anau Kec. Lembang Jaya Kab. Solok	Pelatihan Membatik di Nagari Koto Laweh dan Pelatihan Membuat Keripik Talas Kulit di Nagari Koto Anau	30
10	BNNP Bengkulu	DIPA	Kelurahan Malabero Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu	Pelatihan Kuliner/Pengolahan Ikan Laut	20
11	BNN Kota Bengkulu	DIPA	Balai Kelurahan Tanjung Agung, Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu	Pelatihan Kuliner Khas Bengkulu	20
12	BNNP Babel	DIPA	desa sungai selan atas kec Sungai selan, bangka tengah	Pelatihan Barista Kopi	20
13	BNNK Bangka Selatan	DIPA	Kelurahan Tanjung Ketapang, Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan	Pengolahan Hasil Laut	20
14	BNNP Jambi	DIPA	Desa Talang Belido, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi	Budidaya Ikan lele	10
15	BNNK Batang Hari	DIPA	Desa Mekar Sari NES, Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari	budidaya ikan lele	20
16	BNNP Kepri	DIPA	Kel muka kuning, Kec sei beduk, Kota Batam	pelatihan pembuatan aneka jajanan pasar	15
17	BNNP Riau	DIPA	Kelurahan Kampung dalam, Kecamatan senapelan Kota Pekanbaru	tata boga	20
18	BNNP Lampung	DIPA	Balai Desa Suka Jawa, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah	Budidaya maggot dan tanaman saledri	15
19	BNNK Lampung Selatan	DIPA	Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan	Pembuatan Roti	20
20	BNNP Sulteng	DIPA	Kel. Kayumalue Pajeko, Kec. Palu Utara, Kota Palu	Pelatihan Kuliner	15
21	BNNK Palu	DIPA	Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kec. Palu Utara, Kota Palu	Pelatihan Tata Boga Pembuatan Kue dan Roti	20
22	BNNP Sulawesi Tenggara	DIPA	Kelurahan Nambo, Kec. Abeli, Kota Kendari, Sultra	Pelatihan Kuliner/Pembuatan makanan dari bahan baku ikan	20
23	BNNK Kolaka (Sultra)	DIPA	Kecamatan Wolo, Kelurahan Ulu Wolo, Kab. Kolaka	Pelatihan Pengolahan Ikan Laut	20

NO	SATUAN KERJA	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
24	BNNP Sulawesi Utara	DIPA	Kelurahan Sindulang Satu, Kec. Tuminting, Kota Manado	Pelatihan Kuliner Pembuatan Kue	20
25	BNNK Bolaang Mongondow (Sulut)	DIPA	Desa Otam, Kec. pasi barat, Kab. Bolmong	Pelatihan membuat Gula semut dan Pelatihan membuat Brown Sugar/ Palem Sugar	20
26	BNNP Sulawesi Selatan	DIPA	Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo Kota Makassar	Service HP	20
27	BNNK Palopo (Sulsel)	DIPA	kelurahan salotellu, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo	Kuliner	30
28	BNNP Sulawesi Barat	DIPA	Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju	Kuliner berbahan dasar ikan, pembuatan sambal goreng kemasan khas Mamuju	20
29	BNNK Polewali Mandar (Sulawesi Barat)	DIPA	Cafe Salili Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar	Kuliner (Prozen Food: Dimsum dan Sempol)	20
30	BNNP Gorontalo	DIPA	Desa Tulabolo Kec. Suwawa Timur Kab. Bone Bolango	Pelatihan Kuliner Pembuatan kue & Pertanian (budidaya cabe)	20
31	BNN Kota Gorontalo	DIPA	Aula Kantor Lurah Biawu, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo	Pelatihan Social Media Marketing	20
32	BNNP DKI Jakarta	DIPA	Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Jakarta barat	Kuliner Makanan dan Minuman	20
33	BNNK Jakarta Utara	DIPA	Kelurahan Tanjung Priuk, Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara	Pelatihan Cuci Steam Motor	20
34	BNNK Jakarta Selatan	DIPA	Kelurahan Cilandak Barat Kec. Cilandak Kota, Jakarta Selatan	Barista	16
35	BNNK Jakarta Timur	DIPA	Kelurahan Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur	Kuliner (Nasi Box dan Snack Box)	20
36	BNNP Jawa Barat	DIPA	Desa Ujung Genteng, Kec. Ciracap, Kab. Sukabumi	Pemanfaatan Limbah Kerang Menjadi Produk Kerajinan Tangan	20
37	BNNK Depok	DIPA	Kelurahan Tanah Baru, Kec. Beji, Kota Depok	Craft Rajut	20
38	BNNK Bogor	DIPA	Kantor Desa Jabon Mekar, Kec. Parung, Kabupaten Bogor	Tanaman Hias Retiping	20
39	BNNK Bandung	DIPA	Kel. Babakan Surabaya, Kec. Kiara Codong	Pelatihan Affiliator (E-Commerce)	20
40	BNNK Karawang	DIPA	Desa Pasir Jaya, Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang	Pengelolaan Pupuk	20
41	BNNK Cirebon	DIPA	Desa Haurgeulis, Indramayu	Pelatihan Olahan Mangga & Ternak	20

NO	SATUAN KERJA	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
				Kambing	
42	BNNP Banten	DIPA	Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten	Handycraft pengelolaan plastik sampah menjadi tanaman hias dan pembuatan lilin dari minyak bekas pakai (Jelantah)	20
43	BNNP Banten	NON DIPA	Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten	life guard	15
44	BNNP Banten	NON DIPA	Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak (Baduy Luar)	Pelatihan Instalasi Listrik	20
45	BNNP Banten	DIPA	Desa Talaga Kec. Mancak	kertas daur ulang dari Pelepah Pisang	20
46	BNNK Tangerang	DIPA	Kelurahan Periuk	Pelatihan Barista	20
47	BNNP DIY	DIPA	Kel. Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta	Pelatihan Barista dan Kuliner	20
48	BNNK Yogyakarta	DIPA	Kel. Bausasran, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta	Pengolahan Sampah	20
49	BNNP Jawa Tengah	DIPA	Kel. Parwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	Pelatihan Pembuatan dan Pengemasan Abon Ikan Bandeng	15
50	BNNP Jawa Tengah	HIBAH	Kel. Kaligawe, Kecamatan	Pelatihan olahan ikan (amplang dan kerupuk)	15
51	BNNK Cilacap	DIPA	Desa Karangkemiri Kecamatan Jeruklegi	Pelatihan UMKM	25
52	BNNK Cilacap	NON DIPA	Desa Karangkemiri Kecamatan Jeruklegi	Pelatihan UMKM	25
53	BNNK Cilacap	Non DIPA	Desa Adiraja Kecamatan Adipala, Cilacap	Bimbingan teknis life skill dan sosialisasi P4GN - Google Drive	20
54	BNNK Surakarta	DIPA	Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta	Pelatihan barista alat seduh manual	20
55	BNNP Jatim	DIPA	Kantor Lurah Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya	Pelatihan Urban Farming Budidamber	20
56	BNNP Jatim	DIPA	Desa Bulu kerto, Kecamatan Bumiaji Kota Batu	Pembuatan Produk Kreatif Daur Ulang Sampah Plastik	20
57	BNN Kota Batu	CSR	Desa Bulu kerto, Kecamatan Bumiaji Kota Batu	Pengelolaan Limbah Sampah, Budidaya Lele dan Tanaman Pekarangan	20
58	BNNK Lumajang	DIPA	Kelurahan/Desa Rowo Kangkung, Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang	Pembuatan Pakan Ternak Selase (Pakan Ternak Fermentasi)	20

NO	SATUAN KERJA	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
59	BNNK Tuban	NON DIPA	Desa Tegalagung Kecamatan Semanding	Pelatihan Sablon	50
60	BNNP Kaltim	DIPA	Kelurahan tenun, Kec samarinda sebrang, Kota Samarinda	Olahan Ikan	15
61	BNNK Bontang (Kaltim)	DIPA	Kel Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang	Kuliner	30
62	BNNP Kalimantan Selatan	DIPA	Kelurahan Kelayan Luar , Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kalsel	Pelatihan HandyCraft dengan berbahan Kantong Plastik dan Tutup Botol	20
63	BNNK Hulu Sungai Selatan	DIPA	Desa Gambah Luar Muka, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan	Potong Rambut (Barbershop)	20
64	BNNP Kalimantan Tengah	DIPA	Kelurahan Sei Gohong, Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya	Pembuatan pakan ikan/pelet ikan	15
65	BNNP Kalimantan Tengah	HIBAH	Kelurahan Candi Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat	Sprai dan sarung bantal	15
66	BNNK Palangka Raya (Kalteng)	DIPA	Aula Kel. Pahandut Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya	Pelatihan tata boga pengolahan ikan patin	20
67	BNNP Kalbar	DIPA	Kelurahan Dalam bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak	Pelatihan pencucian AC dan unsur kelistrikan	20
68	BNNK Sanggau	DIPA	Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kab Sanggau	Pelatihan mengolah nugget pisang dan roll pisang	20
69	BNNP Kalimantan Utara	DIPA	Kelurahan Juata Permai, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Prov. Kaltara	Holti kultura	20
70	BNNK Tarakan (Kaltara)	DIPA	kelurahan Karang Anyar Pantai, kecamatan Tarakan Barat, Prov. Kalimantan Utara	Bakery (membuat Roti, donat, pie,dan nastar)	22
71	BNNP Bali	DIPA	Kelurahan Tuban (Desa Adat Kelan), Kec. Kuta, Kab. Badung	Pelatihan peningkatan potensi kepada kelompok Nelayan Samanjaya	15
72	BNNK Klungkung	DIPA	Desa Semarapura Kelod, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung	Pelatihan Baking Kue	25
73	BNNP NTT	DIPA	Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang	Pelatihan Tata Busana Tenun Nusa Tenggara Timur	20
74	BNNK BELU	DIPA	Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT	Pelatihan Peternakan Ayam Boiler dan Pemeliharaan Bibit Boiler	20
75	BNNP NTB	DIPA	Desa Beleka, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah	Pelatihan Kewirausahaan Minuman	20

NO	SATUAN KERJA	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
				Kemasan (Es Kelapa, Teh dan Kopi)	
76	BNNP NTB	NON DIPA	Desa Beleka Praya Timur Lombok Tengah	Perbengkelan, Tata Rias, Tata Boga, Teknisi/service HP dan AC, Food and Beverage Service (waiters)	10
77	BNNK Sumbawa Barat	DIPA	Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat	Kuliner gorengan dan ayam fried chicken	20
78	BNNP Maluku	DIPA	Desa hitu lama kecamatan leihitu kabupaten maluku tengah	Jenis pelatihan pembuatan batako SNI	25
79	BNNK Buru Selatan (Maluku)	DIPA	Desa Fatmite Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan BNNK Buru Selatan	Olahan frozen food dari ikan (nugget ikan, bola-bola ikan, kroket singkong tuna dan abon ikan)	15
80	BNNP Maluku Utara	DIPA	Kel. Salero, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate	Daur Ulang Sampah	20
81	BNNK Tidore Kepulauan	DIPA	Kelurahan Gamtufkange Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan	Pelatihan Barista	20
82	BNNP Papua	DIPA	Kelurahan Argapura, Distrik jayapura selatan, Kab. Jayapura	Potong Rambut (Barbershop)	20
83	BNNK Jayapura	DIPA	Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kab Jayapura	Pelatihan Instalasi Listrik Rumah Tangga	20
84	BNNP Papua Barat	DIPA	Kelurahan Padarni Distrik/kec Manokwari barat,kab.manokwari	Pelatihan pembuatan aneka kripik dan Sambal Ikan	20
85	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Kelurahan Tanjung Uma, Lubuk Baja, Kota Batam	Frozen Food dan krupuk Olahan Ikan Nila	50
86	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Kelurahan Tanjung uma, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam	Budidaya Ikan Nila (Kolam Bioflog)	50
87	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	RPTRA Kampung Rawa Indah Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru	Pelatihan Pengolahan Frozen Food	50
88	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Komplek Permata, Kel. Kedaung Kaliangke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat	Pelatihan Pengolahan Frozen Food	50
89	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Aula Kelurahan Tanah Datar Pekanbaru Riau	Kerajinan Anyaman ketupat dan pengolahan aneka sate	20
90	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Kel. Muara Bahari, Kel Tanjung Priok, Jakut	Frozen Food	50

NO	SATUAN KERJA	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
91	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Desa Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau	Pelatihan Sablon	50
92	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Pelataran Rumah Dinas Kepala Desa Air Itam, Kec. Penukal, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Budi daya ikan air Lele (Bioflok)	50
93	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Kel Karangrejo, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan	Pelatihan aquaponik (Budidaya ikan lele dan budidaya sayur hidroponik)	50
94	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Aula Kecamatan Simbang, Desa Jenetaesa, Kab. Maros	Makanan Ringan dan Barista	50
95	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang	Pelatihan Pembuatan dan Pengemasan Krupuk Ikan dan Amplang	50
	Total		90 desa/kelurahan	95 Pelatihan	2.208 Peserta

Jumlah bimbingan teknis *life skill* yang dilaksanakan sebanyak 95 kali dengan jumlah peserta sebanyak 2.208 orang. Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika dengan target 81 kelompok masyarakat telah tercapai 90 kelompok masyarakat dengan dengan upaya yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) 82 desa/kelurahan yang diintervensi melalui DIPA
- 2) 9 desa/kelurahan yang diintervensi melalui dana hibah/CSR
- 3) 4 desa/Kelurahan yang diintervensi melalui optimalisasi kegiatan DIPA

Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan Pemberdayaan Alternatif melalui Kolaborasi/Dana Hibah/CSR sebagai berikut:

- 1) Program pemberdayaan alternatif yang bersumber pada Non DIPA diimplementasikan oleh BNNP Banten bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dilaksanakan sebanyak dua kali kegiatan yaitu Pelatihan *Life Guard* di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon dengan peserta sebanyak 15 orang dan pelatihan instalasi listrik di Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab.

Lebak (Baduy Luar) dengan peserta sebanyak 20 orang.

- 2) Sebagai wujud nyata kolaborasi, BNNP Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan pelatihan pembuatan kerupuk dan amplang ikan tenggiri di Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Kota Semarang dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang.
- 3) Direktorat Pemberdayaan Alternatif menyelenggarakan Pelatihan Vokasional dalam rangka pemulihan kampung narkoba kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasional dan Produktivitas (BBPVP) Kemenaker, dengan lokus sebagai berikut:
 - a) Masyarakat Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng Kota Adm Jakarta Barat peserta 50 org, jenis pelatihan Kuliner Frozen Food.
 - b) Masyarakat Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat peserta 50 org, jenis pelatihan Kuliner Frozen Food.
- 4) Selain bekerjasama dengan Kemenaker, Direktorat Pemberdayaan Alternatif juga bekerjasama dengan Dinas Koperasi Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam pelatihan Bimtek *Life Skill* vokasional untuk masyarakat Kelurahan Tj.Uma, Kecamatan Lubuk Baja dengan jumlah peserta 50 orang, jenis pelatihan merupakan hasil pelatihan *life skill* sebelumnya yaitu budidaya ikan Nila diolah menjadi nugget dan kerupuk ikan Nila.
- 5) Kegiatan Bimtek Life Skill bagi Masyarakat kawasan rawan narkoba yang diselenggarakan melalui sinergi atau Non DIPA BNN, meliputi:
 - a) BNNK Tuban, kerjasama dengan Pemerintah Desa Desa Tegalagung Kecamatan Semanding.
 - b) BNNK Cilacap, bersinergi dengan Pemerintah Desa Karangemiri, Prodi Kewirausahaan dan Bisnis Digital UNAIC, DPKUKM, DPMPTSP dan Pelaku Usaha Jajankoe Cilacap, Piqpiko dan EO Car Free Day Cilacap.
 - c) BNNP Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Lombok Tengah melaksanakan kegiatan bimtek *life skill* di Desa Beleka Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan keterampilan Perbengkelan, Tata Rias, Tata Boga, Teknisi/service HP dan AC, Food and Beverage Service (waiters) dengan jumlah peserta 10

orang.

2) Capaian Rincian Output QDD.001

Rincian Output Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang (3248.QDD.001), terjadi over prestasi atas kinerja yang di awal targetnya sebanyak 9 kawasan intervensi tercapai 11 kawasan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Rincian Output QDD.001

NO	SATUAN KERJA	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
1	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Desa Huta Tinggi Kec. Panyabungan Timur, Kab. Madina	Kerajinan Anyaman Bambu	20
2	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Desa Huta Tinggi, Kec. Panyabungan Timur, Kab. Madina	Kerajinan Rotan	50
3	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Desa Jurong, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara	Pembuatan Pakan Unggas berbentuk Pellet	20
4	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	DIPA	Desa Luthu Dayah Krueng, Kec. Sukamakmur, Aceh Besar	Budidaya Jagung Pipil dan Jagung Manis	50
5	BNNK Gayo Lues	DIPA	Desa Kota Blangkejeren, Blangkejeren, Gayo Lues	Pelatihan Barista Kopi	35
6	BNNK Lhokseumawe	DIPA	Desa Blang Manyak	Pembuatan Piring dari Pelepah Pinang	30
7	BNNK Lhokseumawe	DIPA	Desa Teupin Rusep	Pembuatan Piring dari Pelepah Pinang	30
8	BNNP Aceh	DIPA	Gampong Leungah, Kecamatan Seulimum, Aceh Besar	Pelatihan Budidaya Tanaman Cabe	30
9	BNNK Aceh Selatan	DIPA	Dusun Tanah Munggu desa Durian Kawan Kec Kluet Timur	Pelatihan Budidaya Kacang Koro	20
10	BNNK Bireuen	DIPA	Desa Geulanggang Gampong Kec. Kota Juang	Pelatihan Menjahit	15
11	BNNK Bireuen	DIPA	Desa Salah Sirong Kec. Jeumpa Kab. Bireuen	Pelatihan Menjahit	15

NO	SATUAN KERJA	SUMBER	LOKASI KEGIATAN	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
12	BNNK Mandailing Natal	DIPA	Desa Huta Bangun Kec. Panyabungan Timur, Kab. Madina	Budidaya Tanaman Jagung	15
	Total		11 desa	12 pelatihan	330 peserta

Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang dengan target 9 kelompok masyarakat tercapai 11 kelompok masyarakat yang diintervensi melalui optimalisasi anggaran dengan jumlah total masyarakat yang dilatih sebanyak 330 orang. Tidak hanya program Bimtek Life skill saja yang dilakukan, tetapi melalui program GDAD alih budidaya komoditi alternatif pertanian dan peternakan.

Tabel 3.7. Data Petani dan Luas Lahan Program GDAD Tahun 2025

NO	SATKER	KAB/KOTA	LOKUS	KEGIATAN/ KOMODITAS	PETANI (ORG)	LAHAN (HA)
1	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	Aceh Besar	Desa Luthu Dayah Krueng, Kec. Sukamakmur	Budidaya Jagung	50	4
2	Dit Dayatif dan BNNK Madina	Mandailing Natal	Desa Aek Nabara	Penandatanganan Kerja Sama pengembangan komoditas tanaman pisang abaka	20	67
3	BNNP Aceh	Aceh Besar	Desa Leungah Kec. Seulimum	Kegiatan Berdikari Tani kerjasama Bank Indonesia • Penyerahan 3 Unit Hand Traktor dan 3 Sarana dan Prasarana Irigasi Tetes • Budidaya Cabe	30	5,5
4	BNNK Bireuen	Bireuen	Gampong Salah Sirong Jaya Kec. Jeumpa	Budidaya jagung	40	20
5	BNNK Mandailing Natal	Mandailing Natal	Desa Huta Bangun, Kec. Panyabungan Timur	Budidaya jagung	15	5
6	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	Aceh Utara	Desa Jurong, Kec. Sawang	1. Budidaya ayam pedaging	12	-
				2. <i>Breeding</i> domba	25	-

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Direktorat Pemberdayaan Alternatif berkolaborasi, bermitra, dan berjejaring dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari K/L, Pemerintah Daerah, hingga sektor

swasta, dalam rangka memulihkan kawasan rawan narkoba. Beberapa capaian sinergi pemangku kepentingan bersama Direktorat Pemberdayaan Alternatif antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Grand Design of Alternative Development (GDAD) 2016–2025 di Provinsi Aceh telah memasuki periode akhir, yaitu fase terwujudnya wilayah Agropolitan dan Agrowisata. Salah satu lokasi yang menunjukkan capaian signifikan adalah Kabupaten Gayo Lues, dengan hasil sebagai berikut:
 - a) Terbentuknya Koperasi Kopi Gayo Lues Bersinar sebagai koperasi binaan BNN yang berperan sebagai *off taker* atau pembeli komoditas kopi GDAD dari masyarakat.
 - b) Terbangunnya pabrik pengolahan kopi menggunakan mesin *huller* untuk mengolah kopi dari buah merah menjadi *green bean*, yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat.
 - c) Terbangunnya *green house* sebagai sarana penjemuran kopi (*green bean*) guna menjaga kualitas produk secara efektif dan efisien.
 - d) Terjadinya ekspansi lahan kopi hingga mencapai 3.086 hektare, melibatkan 2.961 petani dari 126 kelompok tani. Kawasan ini juga telah berkembang menjadi agrowisata dengan demplot seluas 35 hektar yang tersebar di 7 titik lokasi, di mana 4 lokasi merupakan perintisan agrowisata dengan konsep ngopi di kebun kopi. Transformasi ini tidak hanya memperkuat sektor pertanian dan pariwisata, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
- 2) Selanjutnya, Direktorat Pemberdayaan Alternatif bersama BNNK Gayo Lues dan PT Ujang Jaya International melaksanakan kegiatan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang di Kabupaten Gayo Lues. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari mantan penanam ganja, mantan penyalahguna narkoba, dan masyarakat miskin, serta disertai dengan bantuan bibit kopi yang disalurkan melalui Koperasi Kopi Gayo Lues Bersinar.
- 3) Direktorat Pemberdayaan Alternatif juga melaksanakan Bimbingan Teknis Life Skill bagi masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang di Gampong Luthu Dayah Krueng, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten

Aceh Besar. Kegiatan ini memberdayakan 50 petani dengan luas lahan 4 hektar melalui pengembangan komoditas jagung dan pembenihan jagung.

- 4) Di Kabupaten Mandailing Natal, Program GDAD mengembangkan komoditas pisang abaka seluas 67 hektar pada lahan Perhutanan Sosial. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama antara PT Serat Alam Nasional Indonesia (SANI) dengan kelompok tani yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, BNNK Mandailing Natal, dan KPH VIII Kotanopan. Selain itu, pengembangan komoditas jagung juga dilakukan di Desa Huta Bangun seluas 5 hektar dengan melibatkan 15 petani.
- 5) Implementasi GDAD juga diwujudkan melalui Launching Program Berdikari Tani di Desa Leungah, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan ini ditandai dengan penyerahan 3 unit hand traktor dan 3 sarana prasarana irigasi tetes kepada kelompok tani binaan BNNP Aceh, yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Bank Indonesia. Pada lokasi ini turut dikembangkan komoditas cabai seluas 5,5 hektare dengan melibatkan 30 petani.
- 6) Sementara itu, pada GDAD Bireuen Tahun 2025, masyarakat tani Gampong Salah Sirong Jaya, Kecamatan Jeumpa melaksanakan kegiatan bertema “Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang melalui Penanaman Jagung untuk Mewujudkan Indonesia Bersinar, Indonesia Tangguh, dan Indonesia Maju”. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang petani dengan luas lahan garapan 20 hektare.

Outcome yang diterima dihasilkan dari program GDAD dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Selama proses kerja sama dengan PT Ujang, Koperasi membeli Kopi dari Petani lebih tinggi daripada harga dari Tengkulak. Dimana sebelumnya Rp. 20-35 rb oleh tengkulak, kini dibeli dengan Rp. 60.000/kg. Koperasi melakukan pengolahan kopi melalui proses di penjemuran di *Green House* proses Grading Mesin Sutton di Pabrik, menjadi Green Bean Kopi Kualitas Ekspor, dimana Koperasi menjual Green bean ke PT Ujang seharga Rp. 135-140rb/kg. Disini Petani Kopi

GDAD mendapatkan jaminan standar harga jual lebih tinggi dari pada tengkulak.

- 2) Pada tahun 2025 Koperasi Kopi Gayo Lues Bersinar telah menjual green bean dengan kapasitas 250 ton kualitas ekspor (Grade 1) ke PT. Ujang dengan jumlah Rp. 33.750.000.000,- (33,75 M)
- 3) Komoditas kopi GDAD bukan hanya bermanfaat bagi petani kopi saja tetapi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja lainnya seperti upah panen Rp. 30.000 per kaleng (10 kg buah merah) dan dari koperasi mampu memberikan upah dari gabah ke green bean Rp. 500,- per kg, upah penjemuran Rp. 500,- per kg dan upah jasa transportasi ke PT. Ujang Jaya International Rp. 600,- per kg, hal ini tentunya menekan angka kemiskinan juga mengurangi pengangguran di Kabupaten Gayo Lues.
- 4) Benefit bagi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues:
 - Saat ini, kopi GDAD akan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gayo Lues dengan retribusi Rp. 250,-/kg dan estimasi produksi 300 ton/tahun setara Rp. 75 Juta/tahun.
 - Regulasi/Peraturan Bupati (Qhanun) akan menertibkan proses penjualan green bean keluar Gayo Lues sehingga akan meningkatkan peran koperasi (dari pembelian gabah s.d. pengolahan menjadi green bean). Peraturan ini akan mendorong penghasilan lebih tinggi ke Gayo Lues.
 - Estimasi PAD yang akan diperoleh setelah adanya regulasi sebesar Rp. 400 juta/tahun (800 ton x 2 kali panen x Rp. 250,-)
- 5) Dampak Program GDAD bagi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
 - 1 Petani Ganja mempunyai lahan 2 ha; per Ha lahan menghasilkan 2 ton ganja kering siap pakai. Dalam 2 ha menghasilkan 4 ton (4 juta gram) ganja kering.
 - Berdasarkan perhitungan Anatomy of Crime 5 gr ganja kering cukup membuat addict, maka setiap keberhasilan pemberdayaan 1 petani berpotensi menyelamatkan 800.000 jiwa dari penyalahguna baru ganja.
 - Dampak ekonomi dan sosial dari setiap keberhasilan pemberdayaan

1 petani berpotensi dpt efisiensi sebesar 800.000 jiwa x Rp. 30 jt
(biaya Rehabilitasi per orang) = Rp. 24 Triliun/tahun

3) Capaian Tindak Lanjut Kewirausahaan

Hasil monitoring dan Evaluasi Pendampingan pasca program bimtek life skill melalui monitoring dan evaluasi masyarakat binaan yang melanjutkan usaha pasca pengembangan kewirausahaan Jumlah masyarakat binaan yang melanjutkan usaha pasca pengembangan kapasitas melalui Bimtek Life Skill dari target 453 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5. Jumlah Masyarakat yang menindaklanjuti Program Pengembangan Kewirausahaan

No	Satuan Kerja	Jumlah	Keterangan
1	BNNP Jambi	10 Orang	Budidaya Ikan Air Tawar
2	BNNP Kalimantan Selatan	8 Orang	Menjahit dan Usaha Kerajinan Tangan;
3	BNNK Belu	7 Orang	Budidaya Ayam Boiler
4	BNNP Sulawesi Tenggara	9 Orang	Kuliner
5	BNNP Sulawesi Utara	7 Orang	Kuliner
6	BNNK Bengkulu	9 Orang	Kuliner
7	BNNK Jakarta Timur	2 Orang	Kuliner
8	BNNP Jawa Tengah	5 Orang	Kuliner
9	BNNP Kalimantan Barat	4 Orang	Kuliner
10	BNNP Kalimantan Tengah	10 Orang	Memproduksi dan menjual Pakan Ikan dan ternak
11	BNNP Lampung	2 Orang	Membudidayakan Magot, Berjualan Sayur
12	BNNK Gorontalo	4 Orang	Melakukan marketing usahanya Melalui Social Media
13	BNNP Bengkulu	8 Orang	Memproduksi dan memasarkan makanan Secara Online atau sistem Pre Order (PO)
14	BNNK Kolaka	4 Orang	Kuliner
15	BNNK Deli Serdang	10 Orang	Kuliner
16	BNNK Palangkaraya	6 Orang	Kuliner
17	BNNP D.I.Yogyakarta	18 Orang	UMKM
18	BNNK Yogyakarta	20 Orang	Pengelolaan Sampah

No	Satuan Kerja	Jumlah	Keterangan
19	BNNK Batanghari	10 Orang	Menambah keterampilan dari Petani Padi (monokultur) menjadi petani Mina-Padi (Tumpangsari Padi dan Ikan)
20	BNNP Riau	3 Orang	Membuat Jajanan Pasar Dan Pesanan Bolu Kemojo
21	BNNK Polewali Mandar	10 Orang	Kuliner
22	BNNP Sumut	2 Orang	Barber Keliling
23	BNNP Gorontalo	20 Orang	Petani Cabe
24	Direktorat Pemberdayaan Alternatif (Kota Tarakan)	50 Orang	(Budidaya Ikan Lele Dalam Ember)
25	Direktorat Pemberdayaan Alternatif (Kota Semarang)	8 Orang	Kuliner
26	Direktorat Pemberdayaan Alternatif (Kabupaten Maros)	5 Orang	Kuliner
27	Direktorat Pemberdayaan Alternatif (Provinsi Riau)	10 Orang	Wirausaha Kuliner sate dan kerajinan ketupat
28	Direktorat Pemberdayaan Alternatif (Kabupaten Aceh Utara)	20 Orang	Pembuatan Pakan Unggas berbentuk Pellet
29	Direktorat Pemberdayaan Alternatif (Kabupaten Aceh Besar)	50 Orang	Petani Jagung
30	BNNK Sanggau	20 Orang	Kuliner
31	BNNK Cilacap (DIPA)	25 Orang	12 orang melakukan profesi dan konsisten jengan pelatihan yang telah diberikan dan 13 orang beralihprofesi by job
32	BNNK Cilacap (Non DIPA)	25 Orang	Keterampilan UMKM
33	BNNK Solok	6 Orang	IRT menjadi Wiraswasta
34	BNNK Lampung Selatan	7 Orang	Berjualan Kue baik Offline maupun Online
35	BNNP Kalimantan Utara	7 Orang	Beralih profesi menjadi petani
36	BNNK Mandailing Natal	15 Orang	Petani Jagung

No	Satuan Kerja	Jumlah	Keterangan
37	BNNK Bolang Mongondow	7 Orang	Petani Gula
38	BNNP Sulawesi Barat	8 Orang	Kuliner
39	BNNP Sumatera Barat	20 Orang	Kuliner
40	BNNP Kalimantan Timur	15 Orang	Kuliner
41	BNNP Kalimantan Tengah	10 Orang	Menjahit dan Menjual Seprei dan Taplak
42	BNNP Jawa Tengah	1 Orang	Jual Snack dan Makanan
43	BNNK Cilacap (Non DIPA CSR PT.PLN)	20 Orang	UMKM 10 orang melakukan profesi dan konsisten dengan pelatihan yang telah diberikan 10 orang lainnya by job
44	BNNK Tarakan	4 Orang	Berjualan Kue Secara offline Maupun Online
45	BNNP Bali	5 Orang	Nelayan
46	BNNP NTT	9 Orang	Produksi busana (blouse) berbahan tenun & aksesoris
47	BNNK Buru Selatan	15 Orang	Berjualan abon ikan, bola-bola ikan dan nugget ikan baik online maupun offline
48	BNNK Jakarta Utara	4 Orang	Kuliner
49	BNNP Papua Barat	4 Orang	Produksi dan dagang Aneka Kripik
	Total	558 Orang	

Hasil pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas kegiatan Bimbingan Teknis *Life Skill* dari target Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan sebesar 453 orang dan terealisasi 558 Orang (123,18%). Jumlah tersebut diakumulasi dari masyarakat yang masih melakukan praktek, memproduksi untuk kebutuhan keluarga, berwirausaha/dijual, bekerja di sektor formal maupun informal.

4) Rincian Output Juknis Pelaksanaan Pemberdayaan Alternatif

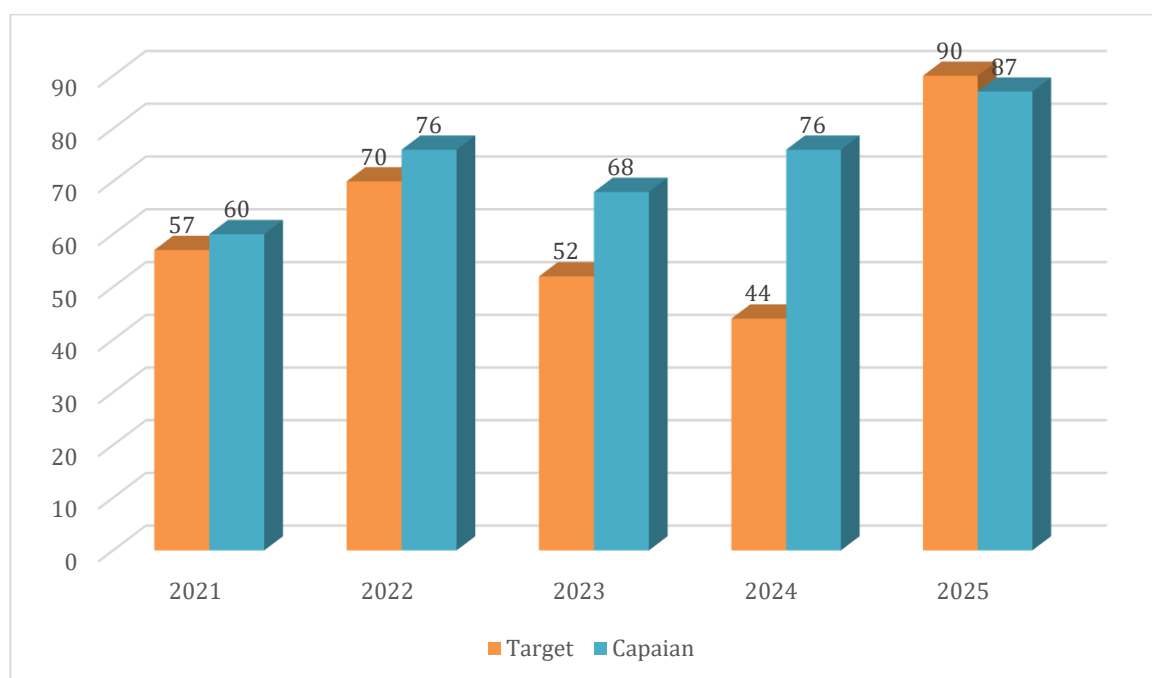
Target Rincian Output Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan Alternatif (3248.AFA) adalah Penyusunan Buku Strategi Kolaborasi Penanganan Kawasan Rawan Tanaman Terlarang dan Kawasan Rawan

Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2026–2029. Buku ini merupakan bagian pendukung Rencana Aksi P4GN Tahun 2025-2029 guna mendorong kolaborasi dan sinergi antara BNN dan K/L dalam penanganan kawasan rawan narkoba di Indonesia. Dalam penyusunannya BNN melibatkan beberapa K/L yang berkontribusi dalam Program P4GN dalam hal perumusan dan integrasi program, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, pembangunan alternatif, pengembangan komoditas alternatif, peningkatan kapasitas SDM dan ketahanan nasional, serta penguatan infrastruktur dan lingkungan.

2. Analisis Dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Tahun 2021-2025) Direktorat Pemberdayaan Alternatif

1) Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Pemberdayaan Alternatif 5 Tahun Terakhir (2021–2025)

Pada analisis dan evaluasi realisasi kinerja kegiatan Direktorat Pemberdayaan Alternatif pada 5 tahun terakhir (2021–2025) tercatat capaian sebagai berikut:



Grafik. 3.7 Target dan Capaian Pemulihan Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2021 s.d. 2025

Perkembangan target dan capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif selama periode 2021–2025. Secara umum, capaian kinerja pada

setiap tahun menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat dan mampu mendekati bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2021, target pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan narkoba ditetapkan sebanyak 57 kawasan dan berhasil dipulihkan sebanyak 60 kawasan, sehingga capaian kinerja melampaui target. Tren positif berlanjut pada Tahun 2022 dengan target 70 kawasan dan capaian meningkat menjadi 76 kawasan pulih.

Pada Tahun 2023, meskipun target ditetapkan sebesar 52 kawasan, realisasi pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan narkoba mencapai 68 kawasan pulih, menunjukkan peningkatan capaian yang signifikan dibandingkan target. Selanjutnya pada Tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 44 kawasan berhasil dilampaui dengan capaian sebesar 76 kawasan pulih, yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan alternatif di lapangan.

Pada Tahun 2025, Direktorat Pemberdayaan Alternatif menetapkan target pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan narkoba tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu 90 kawasan. Realisasi capaian mencapai 87 kawasan, atau mendekati target yang ditetapkan. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian tersebut tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten dalam mendukung pemulihan kawasan rawan narkoba melalui pendekatan pemberdayaan alternatif. Kondisi ini juga disebabkan oleh perubahan pengukuran keterpulihan kawasan rawan dibandingkan 4 (empat) Tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan komitmen dan keberlanjutan upaya Direktorat Pemberdayaan Alternatif dalam meningkatkan cakupan dan kualitas pembinaan kawasan dari tahun ke tahun.

Efektivitas dan konsistensi capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

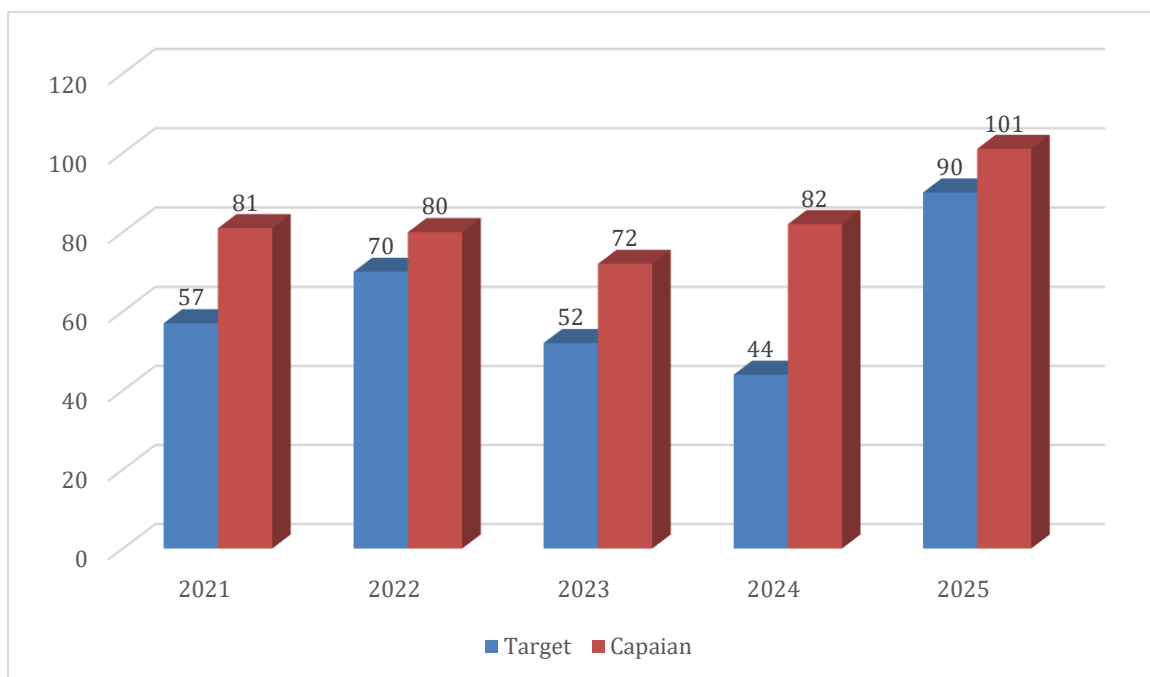
- a. Sinergi pemangku kepentingan, baik K/L, pemerintah daerah, maupun dunia usaha, yang secara berkelanjutan mampu meningkatkan capaian kinerja selama kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2025).
- b. Dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai efektif dalam mempercepat pemulihan kawasan rawan narkoba serta berkontribusi signifikan terhadap capaian kinerja selama lima tahun terakhir

(2021–2025).

- c. Optimalisasi pemanfaatan anggaran melalui DIPA, yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu mendukung pencapaian target kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif secara konsisten selama lima tahun terakhir (2021–2025).

2) Capaian Kinerja Rincian Output 5 Tahun Terakhir (2021-2025)

Pada Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Rincian Output Direktorat Pemberdayaan Alternatif 5 (lima) tahun terakhir tergambar pada Gambar 3.8. berikut ini:



Grafik. 3.8 Target dan Capaian Kinerja Rincian Output Pemberdayaan Alternatif TA. 2021-2025

Target yang ditetapkan setiap tahun merepresentasikan jumlah kawasan rawan narkoba yang direncanakan untuk diintervensi, sedangkan capaian menggambarkan jumlah kawasan yang berhasil diintervensi melalui dukungan pendanaan yang bersumber dari DIPA, Non DIPA, Hibah, dan CSR.

Pada Tahun 2021, target intervensi ditetapkan sebesar 57 kawasan, dengan capaian sebanyak 81 kawasan atau setara dengan 142,11% dari target. Pada Tahun 2022, target meningkat menjadi 70 kawasan, dengan capaian mencapai 80 kawasan atau 114,29% dari target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2023, target intervensi ditetapkan sebesar 52 kawasan,

sementara capaian mencapai 72 kawasan atau 138,46%, yang menunjukkan peningkatan efektivitas pelaksanaan program. Selanjutnya pada Tahun 2024, target intervensi ditetapkan sebanyak 44 kawasan, namun capaian meningkat signifikan menjadi 82 kawasan atau setara dengan 186,36% dari target. Capaian tersebut mencerminkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan serta penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program pemberdayaan alternatif.

Pada Tahun 2025, target intervensi kembali ditingkatkan menjadi 90 kawasan, dengan capaian realisasi sebesar 101 kawasan atau 112,22% dari target. Hal ini menunjukkan keberhasilan konsolidasi program serta sinergi pendanaan dari DIPA, Non DIPA, Hibah, dan CSR dalam memperluas cakupan intervensi kawasan rawan narkoba.

Secara keseluruhan, capaian kinerja rincian output Direktorat Pemberdayaan Alternatif selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan intervensi kawasan rawan narkoba berjalan sangat efektif, dengan persentase capaian yang secara konsisten melampaui target tahunan dan menunjukkan tren penguatan kinerja program dari tahun ke tahun.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Plafon Anggaran

Anggaran Direktorat Pemberdayaan Alternatif T.A 2025 sebesar Rp. 12.697.203.000,- berasal dari RO Fasilitas Pengembangan Potensi Masyarakat pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika (3248.QDD.002), Fasilitas Pengembangan Potensi Masyarakat pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang (3248.QDD.001) serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan Alternatif (3248.AFA).

2. Realisasi Anggaran

Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif (3248) Tahun 2025, pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 12.697.203.000, dengan realisasi sebesar Rp 10.354.333.372 atau mencapai 81,55%. Tingkat penyerapan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan alternatif berjalan optimal dan sebagian besar rencana kegiatan dapat direalisasikan sesuai target

yang telah ditetapkan.

Realisasi tersebut mencerminkan pelaksanaan program yang cukup efektif. Kinerja anggaran diukur menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan pengelolaan kinerja keuangan satuan kerja. IKPA disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan terintegrasi dalam sistem Online Monitoring (OM) SPAN, yang digunakan sebagai ukuran untuk mencerminkan kinerja satuan kerja dalam aspek kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta efisiensi penggunaan anggaran.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang mengaitkan antara alokasi biaya dengan manfaat atau hasil yang diharapkan. Manfaat tersebut dituangkan dalam bentuk target kinerja yang ditetapkan pada setiap unit kerja sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2025.

Masih terdapat ruang untuk peningkatan optimalisasi anggaran pada beberapa komponen kegiatan.

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Direktorat Pemberdayaan Alternatif

Kode	Kegiatan/ KRO/RO	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
3248	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	12.697.203.000	10.183.693.372	80,20
3248. QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	12.296.978.000	9.793.260.792	79,64
3248. AFA	Norma Standard Prosedur dan Kriteria	400.225.000	390.432.580	97,55

Berdasarkan tabel diatas, anggaran didistribusikan kepada 2 (dua) Rincian Output (RO), yaitu pertama, Kegiatan Prioritas Nasional Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat pada Kawasan Rawan Tanaman Terlarang dan kawasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebesar Rp. 12.296.978.000,- dengan realisasi Rp. 9.793.260.792,- (79,64%) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Alternatif dan Satuan Kerja Wilayah.

Rincian Output kedua Petunjuk Teknis Pemberdayaan Alternatif

dengan anggaran sebesar Rp. 400.225.000,00 terealisasi Rp. 390.432.580,00 (97,55%) oleh Direktorat Pemberdayaan Alternatif, telah menghasilkan 1 Buku Petunjuk Teknis Pemberdayaan Alternatif tentang sinergi kolaborasi penanganan kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang telah dicetak didistribusikan kepada Satuan Kerja Pusat, BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten/Kota.

Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2025 per Kegiatan pasca Blokir

NO	KEGIATAN/ OUTPUT	PAGU PASCA BLOKIR	REALISASI	%
1	[3248] Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	10.414.960.000	10.354.333.372	99,42

Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif (3248), pagu anggaran pasca blokir ditetapkan sebesar Rp 10.414.960.000, dengan realisasi sebesar Rp 10.354.333.372 atau 99,42%. Tingginya tingkat realisasi ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan alternatif meskipun terdapat penyesuaian anggaran.

Dengan demikian, kinerja anggaran Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN tergolong sangat baik, adaptif terhadap kebijakan nasional, dan mampu mendukung pencapaian sasaran program secara optimal serta berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 90 kawasan, dengan realisasi kawasan yang berhasil dibina dan pulih sebanyak 87 kawasan, sehingga capaian kinerja mencapai 96,67% dari target yang telah ditetapkan.
2. Dalam fasilitasi pengembangan potensi masyarakat melalui Program *Alternative Development*, capaian pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang mencapai 11 kelompok masyarakat (122,22%) dari target 9 kelompok masyarakat.
3. Sementara itu, fasilitasi pengembangan potensi masyarakat pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika mencapai 90 kelompok masyarakat (111,11%) dari target 81 kelompok masyarakat.
4. Hasil pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas kegiatan Bimbingan Teknis Life Skill dari target Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan sebesar 453 orang dan terealisasi 558 Orang (123,18%). Jumlah tersebut diakumulasi dari masyarakat yang masih melakukan praktek, memproduksi untuk kebutuhan keluarga, berwirausaha/dijual, bekerja di sektor formal maupun informal.
5. Dari aspek pengelolaan anggaran, berdasarkan pagu anggaran pasca blokir sebesar Rp 10.414.960.000,00, realisasi anggaran Direktorat Pemberdayaan Alternatif mencapai Rp 10.354.333.372,00 (99,42%).

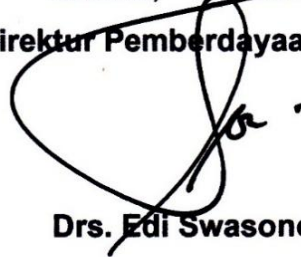
B. REKOMENDASI

1. Penguatan landasan hukum nasional, melalui penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, sebagai payung hukum implementasi kolaborasi penanganan kawasan rawan narkoba yang dapat diimplementasikan secara seragam oleh seluruh Pemerintah Daerah.

2. Penguatan sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk keterlibatan sektor swasta dan filantropi, guna memperluas sumber daya, pendanaan, serta inovasi dalam pelaksanaan P4GN.
3. Optimalisasi peran penggiat P4GN, yang didukung oleh organisasi kemasyarakatan, dengan penetapan lokus prioritas pada kawasan rawan, khususnya wilayah pesisir dan perbatasan, sebagai wilayah dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap peredaran narkoba.
4. Penguatan pemetaan sosial sebagai dasar penentuan jenis pelatihan *life skill* yang akan diberikan kepada masyarakat, sehingga selaras dengan peluang kerja maupun wirausaha dan relevan dengan kondisi sosial ekonomi setempat.
5. Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha/perusahaan melalui optimalisasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) agar dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.

Jakarta, Januari 2026

Direktur Pemberdayaan Alternatif



Drs. Edi Swasono, M.M.

LAMPIRAN







PERUBAHAN STATUS KAWASAN RAWAN NARKOBA

No	Desa/ Kelurahan	Prov.	Satker	Indeks IKRN Awal	Status IKRN Awal	Indeks IKRN Akhir	Status IKRN Akhir	Pulih/ Belum Pulih
1	Gampong Leungah, Kecamatan Seulimum, Aceh Besar	Aceh	BNNP Aceh	1,41	Bahaya	1,85	Waspada	Pulih
2	Gampong Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe		BNNP Aceh	1,00	Bahaya	2.26	Siaga	Pulih
3	Desa Luthu Dayah Krueng, Kec. Sukamakmur, Aceh Besar		Direktorat Dayatif	1,00	Bahaya	1.85	Waspada	Pulih
4	Desa Kota Blangkejeren, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues		BNNK Gayo Lues	2,00	Waspada	2.22	Siaga	Pulih
5	Desa Durian Kawan Kec Kluet Timur, Kab. Aceh Selatan		BNNK Aceh Selatan	1.21	Bahaya	1.52	Bahaya	Pulih
6	Gampong alue dua kec angsa baro kota langsa		BNNK Langsa	1.00	Bahaya	2.19	Siaga	Pulih
7	Desa Blang Banyak Kec. Sawang Kab Aceh Utara		BNNK Lhokseumawe	1,41	Bahaya	1.85	Waspada	Pulih
8	Desa Teupin Rusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara		BNNK Lhokseumawe	1,41	Bahaya	1.76	Waspada	Pulih
9	Desa Jurong, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara		Direktorat Dayatif	1,41	Bahaya	1.92	Waspada	Pulih
10	Desa Salah Sirong Kec. Jeumpa Kabupaten Bireuen		BNNK Bireuen	1,41	Bahaya	1.81	Waspada	Pulih
11	Desa Geulanggang Gampong Kec. Kota		BNNK Bireuen	-	-	1.90	Waspada	Belum Terukur

No	Desa/ Kelurahan	Prov.	Satker	Indeks IKRN Awal	Status IKRN Awal	Indeks IKRN Akhir	Status IKRN Akhir	Pulih/ Belum Pulih
	Juang Kab Bireuen							
12	Desa sidorejo, kecamatan medan tembung, Kota Medan	Sumut	BNNP Sumut	1,00	Bahaya	1.97	Waspada	Pulih
13	Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar kota tanjungbalai		BNNK Tanjung balai	1.93	Waspada	2.11	Siaga	Pulih
14	Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang		BNNK Deli Serdang	1.00	Bahaya	1.80	Waspada	Pulih
15	Desa Londut, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara		BNNK Labuanbatu Utara	1.41	Bahaya	2.10	Waspada	Pulih
16	Desa Huta Bangun Kecamatan Panyabungan Timur, Kab. Mandailing Natal		BNNK Mandailing Natal	1.21	Bahaya	1.53	Bahaya	Pulih
17	Desa Huta Tinggi Kec. Panyabungan Timur, Kab. Madina		Direktorat Dayatif	1,21	Bahaya	1.85	Waspada	Pulih
18	Kel muka kuning, Kec sei beduk, Kota Batam	Kepri	BNNP Kepri	1.00	Bahaya	2.02	Waspada	Pulih
19	Kelurahan Tanjung Uma, Lubuk Baja, Kota Batam		Direktorat Dayatif	1.61	Waspada	1.96	Waspada	Pulih
20	Kelurahan Kampung dalam, Kecamatan senapelan Kota Pekanbaru	Riau	BNNP Riau	1.00	Bahaya	2.11	Siaga	Pulih
21	Kel. Tanah Datar, Kec. Pekan Baru Kota, Kota Pekanbaru Riau		Direktorat Dayatif	1.00	Bahaya	2.06	Waspada	Pulih

No	Desa/ Kelurahan	Prov.	Satker	Indeks IKRN Awal	Status IKRN Awal	Indeks IKRN Akhir	Status IKRN Akhir	Pulih/ Belum Pulih
22	Kantor Desa Tulung Selapan Ilir, Kabupaten Oki	Sumsel	BNNP Sumsel	1.00	Bahaya	2.49	Siaga	Pulih
23	Desa Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan		Direktorat Dayatif	1.00	Bahaya	1.86	Waspada	Pulih
24	Kel. Gates Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang	Sumbar	BNNP Sumbar	1.00	Bahaya	2.25	Siaga	Pulih
25	Nagari Koto Anau Kec. Lembang Jaya Kab. Solok		BNNK Solok	1.00	Bahaya	1.90	Waspada	Pulih
26	Balai Desa Suka Jawa Kec. Bumi Ratu Tuban Kab. Lampung Tengah	Lampun g	BNNP Lampung	1.00	Bahaya	1.96	Waspada	Pulih
27	Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan		BNNK Lampung Selatan	2.10	Waspada	2,19	Siaga	Pulih
28	Desa Talang Belido, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi	Jambi	BNNP Jambi	2.05	Waspada	2.18	Siaga	Pulih
29	Desa Mekar Sari NES, Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari		BNNK Batang Hari	1.91	Waspada	2.19	Siaga	Pulih
30	desa sungai selan atas dan kel sungai selan, kec Sungai selan, bangka tengah	Babel	BNNP Babel	1.95	Waspada	2.11	Siaga	Pulih
31	Kelurahan Tanjungketapang, Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan		BNNK Bangka Selatan	1.00	Bahaya	1.70	Waspada	Pulih
32	Kelurahan Malabero Kec. Teluk Segara, Kota	Bengkul u	BNNP BENGKULU	1.64	Waspada	1.76	Waspada	Belum Pulih

No	Desa/ Kelurahan	Prov.	Satker	Indeks IKRN Awal	Status IKRN Awal	Indeks IKRN Akhir	Status IKRN Akhir	Pulih/ Belum Pulih
	Bengkulu							
33	Balai Kelurahan Tanjung Agung, Kec. Sungai Seruit, Kota Bengkulu		BNN KOTA BENGKULU	2.02	Waspada	2.03	Waspada	Belum Pulih
34	Kelurahan Kota bambu selatan , kec palmerah , jakarta barat	DKI Jakarta	BNNP DKI	1.00	Bahaya	1.82	Waspada	Pulih
35	Kelurahan Tanjung Priuk, Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara		BNNK Jakarta Utara	1.00	Bahaya	2.07	Waspada	Pulih
36	Kelurahan Cilandak Barat Kec. Cilandak Kota, Jakarta Selatan		BNNK Jakarta Selatan	2.04	Waspada	2,16	Siaga	Pulih
37	Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur		BNNK Jakarta Timur	1,85	Waspada	2.13	Siaga	Pulih
38	RPTRA Kampung Rawa Indah Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru		Direktorat Dayatif	2.84	Aman			Belum Terukur
39	Komplek Permata, Kel. Kedaung Kaliangke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat		Direktorat Dayatif	1.00	Bahaya	2.00	Waspada	Pulih
40	Kel Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara		Direktorat Dayatif	1.00	Bahaya	2.07	Waspada	Pulih
41	Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten	Banten	BNNP Banten	1.00	Bahaya	1.80	Waspada	Pulih
42	Desa Talaga Kec. Mancak, Serang, Banten		BNNP Banten	2.09	Waspada	1.81	Waspada	Belum Pulih
43	Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab.		BNNP Banten	2.13	Siaga			Belum Terukur

No	Desa/ Kelurahan	Prov.	Satker	Indeks IKRN Awal	Status IKRN Awal	Indeks IKRN Akhir	Status IKRN Akhir	Pulih/ Belum Pulih
	Lebak (Baduy Luar)							
44	Kel Periuk, Periuk, KOTA TANGERANG		BNNK Tangerang	1.00	Bahaya			Belum Terukur
45	Desa Ujung Genteng Kec. Ciracap Kab Sukabumi	Jabar	BNNP Jawa Barat	1.00	Bahaya	1.83	Waspada	Pulih
46	Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok		BNNK Depok	2.05	Waspada	2,16	Siaga	Pulih
47	Kel Babakan Surabaya, Kec Kiara Codong, Kota Bandung		BNNK Bandung	2.05	Waspada	2.13	Siaga	Pulih
48	Desa Haurgeulis, Kec. Haurgeulis, Kab. Indramayu		BNNK Cirebon	1.00	Bahaya	1.97	Waspada	Pulih
49	Desa Pasir Jaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang		BNNK Karawang	1.00	Bahaya	2.16	Siaga	Pulih
50	Desa Jabon Mekar, Kec. Parung, Kab. Bogor		BNNK Bogor	1.00	Bahaya	2.04	Waspada	Pulih
51	Kelurahan Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang,	Jateng	BNNP Jawa Tengah	1.00	Bahaya	1.93	Waspada	Pulih
52	kel. kaligawe kec gayamsari kota semarang		BNNP Jawa Tengah	2.23	Siaga	1.96	Waspada	Belum Pulih
53	Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang		Direktorat Dayatif	1.00	Bahaya	2,04	Waspada	Pulih
54	Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta		BNNK Surakarta	1.00	Bahaya	1.89	Waspada	Pulih
55	Desa Karangkemiri Kecamatan Jeruklegi, Cilacap		BNNK cilacap	2.05	Waspada	2.20	Siaga	Pulih

No	Desa/ Kelurahan	Prov.	Satker	Indeks IKRN Awal	Status IKRN Awal	Indeks IKRN Akhir	Status IKRN Akhir	Pulih/ Belum Pulih
56	Desa Adiraja Kecamatan Adipala, Cilacap		BNNK Cilacap	2.06	Waspada	2.22	Siaga	Pulih
57	Kel. Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta	DIY	BNNP DIY	1	Bahaya	2,25	Siaga	Pulih
58	Kel. Bausasran, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta		BNNK Yogyakarta	1	Bahaya	1,91	Waspada	Pulih
59	Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya	Jatim	BNNP Jatim	1.93	Waspada	2.18	Siaga	Pulih
60	Desa Bulu kerto, Kecamatan Bumiaji Kota Batu		BNN Kota Batu	1.00	Bahaya	2.25	Siaga	Pulih
61	Kelurahan/Desa Rowo Kangkung, Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang		BNNK Lumajang	2.09	Waspada	2.12	Siaga	Pulih
62	Desa Tegalagung Kecamatan Semanding		BNNK Tuban	2.09	Waspada	2.05	Waspada	Belum Pulih
63	Kelurahan Dalam bugis, kecamatan pontianak timur kota pontianak	Kalbar	BNNP Kalbar	1.00	Bahaya	2.05	Waspada	Pulih
64	Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kab Sanggau		BNNK Sanggau	1.41	Bahaya	1.76	Waspada	Pulih
65	Desa Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau		Direktorat Dayatiff	1.41	Bahaya	1.63	Waspada	Pulih
66	Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu	Kalteng	BNNP Kalimantan	1.96	Waspada	2.03	Waspada	Belum Pulih

No	Desa/ Kelurahan	Prov.	Satker	Indeks IKRN Awal	Status IKRN Awal	Indeks IKRN Akhir	Status IKRN Akhir	Pulih/ Belum Pulih
	Kota Palangka Raya		Tengah					
67	Kelurahan Candi Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat		BNNP Kalimantan Tengah	1.00	Bahaya	2.05	Waspada	Pulih
68	Aula kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya		BNNK Palangka Raya (Kalteng)	1.00	Bahaya	2.15	Siaga	Pulih
69	Kelurahan Kelayan Luar , Kecamatan Banjarmasin Tengah	Kalsel	BNNP Kalimantan Selatan	1.00	Bahaya	1.63	Waspada	Pulih
70	Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan		BNNK Hulu Sungai Selatan	2.05	Waspada	2.11	Siaga	Pulih
71	Kelurahan tenun, Kec samarinda sebrang, Kota Samarinda	Kaltim	BNNP Kaltim	1.00	Bahaya	1.98	Waspada	Pulih
72	Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang		BNNK Bontang	1.00	Bahaya	2.09	Waspada	Pulih
73	Kelurahan Juata Permai, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Prov. Kaltara	Kaltara	BNNP Kalimantan Utara	1.21	Bahaya	1.93	Waspada	Pulih
74	kelurahan Karang Anyar Pantai, kecamatan Tarakan Barat, Prov. Kalimantan Utara		BNNK Tarakan (Kaltara)	1.21	Bahaya	1.91	Waspada	Pulih
75	Kel Karangrejo, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan		Direktorat Dayatif	1.21	Bahaya	1.86	Waspada	Pulih
76	Kelurahan Sindulang Satu, Kec. Tuminting, Kota Manado	Sulut	BNNP SULAWESI UTARA	2.00	Waspada	1.85	Waspada	Belum Pulih

No	Desa/ Kelurahan	Prov.	Satker	Indeks IKRN Awal	Status IKRN Awal	Indeks IKRN Akhir	Status IKRN Akhir	Pulih/ Belum Pulih
77	Desa Otam, Kec. Passi Barat, Kab. Bolaang Mongondow		BNNK BOLAANG MONGONDOW	1.87	Waspada	2,16	Siaga	Pulih
78	Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kec. Palu Utara, Kota Palu	Sulteng	BNNP Sulteng	1.00	Bahaya	1.70	Waspada	Pulih
79	Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kec. Palu Utara, Kota Palu		BNNK Palu	1.00	Bahaya	1.89	Waspada	Pulih
80	Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo Kota Makassar	Sulsel	BNNP Sulawesi Selatan	1.00	Bahaya	1.99	Waspada	Pulih
81	Kota Palopo, Kecamatan Wara Timur, Kelurahan Salotellue		BNNK Palopo	1.92	Waspada	2,11	Siaga	Pulih
82	Kecamatan Simbang, Desa Jenetaesa, Kab. Maros		Direktorat Dayatif	1,99	Waspada	2,14	Siaga	Pulih
83	Kelurahan Nambo, Kec. Abeli, Kota Kendari	Sultra	BNNP SULAWESI TENGGARA	2,05	Waspada	2,16	Siaga	Pulih
84	Aula Kantor Kecamatan Wolo, Kelurahan Ulu Wolo, Kab. Kolaka		BNNK KOLAKA	1,59	Bahaya	1,8	Waspada	Pulih
85	Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju	Sulbar	BNNP Sulawesi Barat	2.05	Waspada	2,12	Siaga	Pulih
86	Kelurahan Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar		BNNK Polewali Mandar (Sulawesi Barat)	1.00	Bahaya	1.76	Waspada	Pulih
87	Desa Tulabolo Kec. Suwawa Timur Kab. Bone Bolango	Gorontalo	BNNP GORONTALO	1	Bahaya	1,63	Waspada	Pulih
88	Aula Kantor Lurah Biawu Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo		BNN KOTA GORONTALO	1.00	Bahaya	2.11	Siaga	Pulih

No	Desa/ Kelurahan	Prov.	Satker	Indeks IKRN Awal	Status IKRN Awal	Indeks IKRN Akhir	Status IKRN Akhir	Pulih/ Belum Pulih
89	Desa hitu lama kec. leihitu kabupaten maluku tengah	Maluku	BNNP Maluku	1.01	Bahaya			Belum Terukur
90	Desa Fatmite Kec. Namrole Kabupaten Buru Selatan BNNK Buru Selatan		BNNK Buru Selatan (Maluku)	1.60	Waspada	1,72	Waspada	belum Pulih
91	Kel. Salero Kec. Ternate Utara kota Ternate Prov. Maluku Utara	Malut	BNNP Maluku Utara	1.41	Bahaya	1.83	Waspada	Pulih
92	Kel. Gamtufkange Kec. Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan		BNNK Tidore Kepulauan	1.41	Bahaya	2,04	Waspada	Pulih
93	Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kabupaten Badung	Bali	BNNP Bali	1.00	Bahaya	2.09	Waspada	Pulih
94	Kel. Semarapura Klod, Kec. Klungkung		BNNK Klungkung	1.61	Waspada	1.99	Waspada	Pulih
95	Desa Beleka, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah	NTB	BNNP NTB	1.00	Bahaya	1.76	Waspada	Pulih
96	Desa Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat		BNNK Sumbawa Barat	2.01	Waspada	1.88	Waspada	belum Pulih
97	Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang	NTT	BNNP NTT	1.00	Bahaya	2.11	Siaga	Pulih
98	Desa Silawan, Kec. Tasifeto Timur, Kabupaten Belu		BNNK BELU	1.00	Bahaya	1.88	Waspada	Pulih
99	Kelurahan Argapura, Distrik jayapura selatan, Kab. Jayapura	Papua	BNNP PAPUA	2.01	Waspada	2.18	Siaga	Pulih
100	Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur Kab Jayapura		BNNK Jayapura	1.40	Bahaya	1.74	Waspada	Pulih
101	Kelurahan Padarni Distrik/kec Manokwari barat,kab.manokwari	Pabar	BNNP PAPUA BARAT	1.00	Bahaya	2.02	Waspada	Pulih



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kawasan
Rawan Narkoba (IKRN) Tahun 2025

Jakarta, 23 Desember 2025

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kab/Kota

di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat T.A. 2025.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kawasan Rawan Narkoba (IKRN) melalui jajaran PJ Dayamas BNNP dan BNNK dengan metode survey berbasis web yang dilaksanakan pada 300 Desa/Kelurahan di 34 Provinsi di Indonesia.

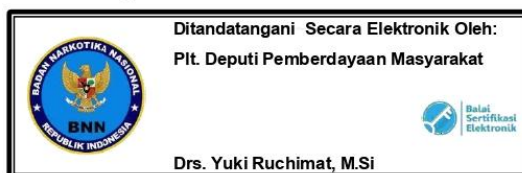
3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKRN tahun 2025 sebagaimana terlampir. Perlu diinformasikan bahwa wilayah yang tidak diukur ulang pada Bulan November-Desember 2025 masih menggunakan hasil pengukuran tahun 2024.

4. Berkaitan dengan poin 3 (tiga) diatas, maka BNNP dan BNNK agar melakukan tindak lanjut intervensi pada kawasan yang angka indeks 2025 lebih tinggi dari pada angka indeks 2024 sesuai rekomendasi tabel berikut:

Indeks 2024	Status Kerawanan	Indeks 2025	Status Kerawanan	Status Keterpulihan	Rekomendasi
1,00-1,20	Bahaya	1,21-1,40	Bahaya	Pulih	Lanjutkan Intervensi
1,21-1,40	Bahaya	1,41-1,60	Bahaya	Pulih	Lanjutkan Intervensi
1,41-1,60	Bahaya	1,61-1,77	Waspada	Pulih	Lanjutkan Intervensi
1,61-1,77	Waspada	1,78-1,94	Waspada	Pulih	Lanjutkan Intervensi
1,78-1,94	Waspada	1,95-2,10	Waspada	Pulih	Lanjutkan Intervensi
1,95-2,10	Waspada	2,11-3,50	Siaga/Aman	Pulih	Cukup/Pindah Lokasi

5. Bagi kawasan yang indeks 2025 tetap atau lebih kecil dari indeks 2024 maka BNNP dan BNNK harus melanjutkan intervensi dengan meningkatkan pola pembinaan masyarakat, dan bersinergi dengan *stakeholder* yang lebih intensif.
6. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Pjt. Inspektur Utama BNN.

HASIL PENGUKURAN INDEKS KAWASAN RAWAN NARKOBA TAHUN 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
1	Durian Kawan	Kluet Timur	Kab. Aceh Selatan	Aceh	1,52	Bahaya
2	Paya Dapur	Kluet Timur	Kab. Aceh Selatan	Aceh	1,41	Bahaya
3	Leungah	Seulimeum	Kab. Aceh Besar	Aceh	1,85	Waspada
4	Lampisang Dayah	Seulimeum	Kab. Aceh Besar	Aceh	1,00	Bahaya
5	Le Seum	Mesjid Raya	Kab. Aceh Besar	Aceh	1,22	Bahaya
6	Luthu Dayah Krueng	Sukamakmur	Kab. Aceh Besar	Aceh	1,85	Waspada
7	Luthu Lamweu	Sukamakmur	Kab. Aceh Besar	Aceh	1,89	Waspada
8	Teupin Rusep	Sawang	Kab. Aceh Utara	Aceh	1,76	Waspada
9	Salah Sirong Jaya	Jeumpa	Kab. Bireuen	Aceh	1,81	Waspada
10	Tampeng Musara	Kutapanjang	Kab. Gayo Lues	Aceh	1,95	Waspada
11	Kutebukit	Blangpegayon	Kab. Gayo Lues	Aceh	1,71	Waspada
12	Kota Blangkejeren	Blangkejeren	Kab. Gayo Lues	Aceh	2,22	Siaga
13	Cot Girek Kandang	Muara Dua	Kota Lhokseumawe	Aceh	2,26	Siaga
14	Alue Dua	Langsa Baro	Kota Langsa	Aceh	2,19	Siaga
15	Lambaro Biluy	Darul Kamal	Kab. Aceh Besar	Aceh	1,25	Bahaya
16	Geulanggang Gampong	Kota Juang	Kab. Bireuen	Aceh	1,90	Waspada
17	Blang Banyak	Sawang	Kab. Aceh Utara	Aceh	1,85	Waspada

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
18	Jurong	Sawang	Kab. Aceh Utara	Aceh	1,92	Waspada
19	Tanjung Morawa A	Tanjung Morawa	Kab. Deli Serdang	Sumatera Utara	2,01	Waspada
20	Sunggal Kanan	Sunggal	Kab. Deli Serdang	Sumatera Utara	1,80	Waspada
21	Rahuning	Rahunig	Kab. Asahan	Sumatera Utara	1,59	Bahaya
22	Huta Bangun	Panyabungan Timur	Kab. Mandailing Natal	Sumatera Utara	1,53	Bahaya
23	Huta Tinggi	Panyabungan Timur	Kab. Mandailing Natal	Sumatera Utara	1,85	Waspada
24	Londut	Kualuh Hulu	Kab. Labuhanbatu Utara	Sumatera Utara	2,10	Waspada
25	Lalang	Medan Sunggal	Kota Medan	Sumatera Utara	1,83	Waspada
26	Tanjung Gusta	Medan Helvetia	Kota Medan	Sumatera Utara	2,04	Waspada
27	Sidorejo	Medan Tembung	Kota Medan	Sumatera Utara	1,97	Waspada
28	Aur	Medan Maimun	Kota Medan	Sumatera Utara	2,03	Waspada
29	Pantai Burung	Tanjung Balai Selatan	Kota Tanjung Balai	Sumatera Utara	2,09	Waspada
30	Pantai Johor	Datuk Bandar	Kota Tanjung Balai	Sumatera Utara	2,11	Siaga
31	Tebing	Tebing	Kab. Karimun	Kep. Riau	2,06	Waspada
32	Tanjung Riau	Sekupang	Kota Batam	Kep. Riau	1,95	Waspada
33	Tanjung Uma	Lubuk Baja	Kota Batam	Kep. Riau	1,96	Waspada
34	Muka Kuning	Sei Beduk	Kota Batam	Kep. Riau	2,02	Waspada
35	Bengkong Laut	Bengkong	Kota Batam	Kep. Riau	1,80	Waspada
36	Dompak	Bukit Bestari	Kota Tanjung Pinang	Kep. Riau	1,99	Waspada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
37	Tanah Datar	Pekanbaru Kota	Kota Pekanbaru	Riau	2,06	Waspada
38	Kampung Dalam	Senapelan	Kota Pekanbaru	Riau	2,11	Siaga
39	Lubuk Gaung	Sungai Sembilan	Kota Dumai	Riau	1,85	Waspada
40	Pelintung	Medang Kampai	Kota Dumai	Riau	1,72	Waspada
41	Laksamana	Dumai Kota	Kota Dumai	Riau	1,75	Waspada
42	Koto Gadang Koto Anau	Lembang Jaya	Kab. Solok	Sumatera Barat	1,90	Waspada
43	Muaro Paneh	Bukit Sundi	Kab. Solok	Sumatera Barat	1,87	Waspada
44	Kampung Pondok	Padang Barat	Kota Padang	Sumatera Barat	1,86	Waspada
45	Gates Nan XX	Lubuk Begalung	Kota Padang	Sumatera Barat	2,25	Siaga
46	Tulung Selapan Ilir	Tulung Selapan	Kab. Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	2,49	Siaga
47	Air Itam	Penukal	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Sumatera Selatan	1,86	Waspada
48	Rangai Tri Tunggal	Katibung	Kab. Lampung Selatan	Lampung	1,97	Waspada
49	Titiwangi	Candipuro	Kab. Lampung Selatan	Lampung	2,19	Siaga
50	Suka Jawa	Bumi Ratu Nuban	Kab. Lampung Tengah	Lampung	1,96	Waspada
51	Kutadalom	Gisting	Kab. Tanggamus	Lampung	1,86	Waspada
52	Braja Gemilang	Braja Selebah	Kab. Lampung Timur	Lampung	2,02	Waspada
53	Tiuh Balak Pasar	Baradatu	Kab. Way Kanan	Lampung	2,03	Waspada
54	Keteguhan	Telukbetung Timur	Kota Bandar Lampung	Lampung	1,85	Waspada

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
55	Karangrejo	Metro Utara	Kota Metro	Lampung	2,12	Siaga
56	Muara Bulian	Muara Bulian	Kab. Batanghari	Jambi	1,92	Waspada
57	Teratai	Muara Bulian	Kab. Batanghari	Jambi	1,86	Waspada
58	Pasar Baru	Muara Bulian	Kab. Batanghari	Jambi	2,09	Waspada
59	Rengas Condong	Muara Bulian	Kab. Batanghari	Jambi	1,98	Waspada
60	Bajubang	Bajubang	Kab. Batanghari	Jambi	1,83	Waspada
61	Mekar Sari Nes	Bajubang	Kab. Batanghari	Jambi	2,19	Siaga
62	Pematang Gajah	Jambi Luar Kota	Kab. Muaro Jambi	Jambi	1,77	Waspada
63	Kasang Pudak	Kumpeh Ulu	Kab. Muaro Jambi	Jambi	1,78	Waspada
64	Talang Belido	Sungai Gelam	Kab. Muaro Jambi	Jambi	2,18	Siaga
65	Sido Mukti	Dendang	Kab. Tanjung Jabung Timur	Jambi	2,49	Siaga
66	Catur Rahayu	Dendang	Kab. Tanjung Jabung Timur	Jambi	1,78	Waspada
67	Jelmu	Pelayangan	Kota Jambi	Jambi	1,94	Waspada
68	Ulu Gedong	Danau Teluk	Kota Jambi	Jambi	2,09	Waspada
69	Rawa Sari	Alam Barajo	Kota Jambi	Jambi	2,18	Siaga
70	Legok	Danau Sipin	Kota Jambi	Jambi	1,97	Waspada
71	Sri Menanti	Sungailiat	Kab. Bangka	Kep. Bangka Belitung	1,94	Waspada
72	Air Ruai	Pemali	Kab. Bangka	Kep. Bangka Belitung	1,73	Waspada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
73	Karya Makmur	Pemali	Kab. Bangka	Kep. Bangka Belitung	1,64	Waspada
74	Dukong	Tanjung Pandan	Kab. Belitung	Kep. Bangka Belitung	1,73	Waspada
75	Aik Ketekok	Tanjung Pandan	Kab. Belitung	Kep. Bangka Belitung	1,61	Waspada
76	Tanjong Tinggi	Sijuk	Kab. Belitung	Kep. Bangka Belitung	1,62	Waspada
77	Toboali	Toboali	Kab. Bangka Selatan	Kep. Bangka Belitung	2,12	Siaga
78	Teladan	Toboali	Kab. Bangka Selatan	Kep. Bangka Belitung	1,72	Waspada
79	Tanjungketapang	Toboali	Kab. Bangka Selatan	Kep. Bangka Belitung	1,70	Waspada
80	Beluluk	Pangkalan Baru	Kab. Bangka Tengah	Kep. Bangka Belitung	1,69	Waspada
81	Batu Belubang	Pangkalan Baru	Kab. Bangka Tengah	Kep. Bangka Belitung	1,54	Bahaya
82	Sungai Selan Atas	Sungai Selan	Kab. Bangka Tengah	Kep. Bangka Belitung	2,11	Siaga
83	Lontong Pancur	Pangkal Balam	Kota Pangkal Pinang	Kep. Bangka Belitung	1,83	Waspada
84	Parit Lalang	Rangkui	Kota Pangkal Pinang	Kep. Bangka Belitung	2,03	Waspada
85	Gabek Satu	Gabek	Kota Pangkal Pinang	Kep. Bangka Belitung	1,71	Waspada
86	Sido Luhur	Sukaraja	Kab. Seluma	Bengkulu	1,84	Waspada
87	Betungan	Selebar	Kota Bengkulu	Bengkulu	2,12	Siaga
88	Malabero	Teluk Segara	Kota Bengkulu	Bengkulu	1,76	Waspada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
89	Anggut Dalam	Ratu Samban	Kota Bengkulu	Bengkulu	1,86	Waspada
90	Tanjung Agung	Sungai Serut	Kota Bengkulu	Bengkulu	2,03	Waspada
91	Timur Indah	Singaran Pati	Kota Bengkulu	Bengkulu	1,76	Waspada
92	Kedaung Kali Angke	Cengkareng	Kota Adm. Jakarta Barat	DKI Jakarta	2,00	Waspada
93	Kota Bambu Selatan	Pal Merah	Kota Adm. Jakarta Barat	DKI Jakarta	1,82	Waspada
94	Cilandak Barat	Cilandak	Kota Adm. Jakarta Selatan	DKI Jakarta	2,16	Siaga
95	Bintaro	Pesanggrahan	Kota Adm. Jakarta Selatan	DKI Jakarta	1,93	Waspada
96	Makasar	Makasar	Kota Adm. Jakarta Timur	DKI Jakarta	1,73	Waspada
97	Kelapa Dua Wetan	Ciracas	Kota Adm. Jakarta Timur	DKI Jakarta	2,13	Siaga
98	Susukan	Ciracas	Kota Adm. Jakarta Timur	DKI Jakarta	1,93	Waspada
99	Tanjung Priok	Tanjung Priok	Kota Adm. Jakarta Utara	DKI Jakarta	2,07	Waspada
100	Kamal Muara	Penjaringan	Kota Adm. Jakarta Utara	DKI Jakarta	2,09	Waspada
101	Pasar Kemis	Pasar Kemis	Kab. Tangerang	Banten	1,82	Waspada
102	Cisauk	Cisauk	Kab. Tangerang	Banten	1,75	Waspada
103	Ranjeng	Ciruas	Kab. Serang	Banten	1,97	Waspada
104	Talaga	Mancak	Kab. Serang	Banten	1,81	Waspada
105	Periuk	Periuk	Kota Tangerang	Banten	1,96	Waspada
106	Uwung Jaya	Cibodas	Kota Tangerang	Banten	2,10	Siaga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
107	Mekarsari	Pulomerak	Kota Cilegon	Banten	1,80	Waspada
108	Cipare	Serang	Kota Serang	Banten	2,09	Waspada
109	Sumur Pecung	Serang	Kota Serang	Banten	2,03	Waspada
110	Kaligandu	Serang	Kota Serang	Banten	1,89	Waspada
111	Kagungan	Serang	Kota Serang	Banten	1,90	Waspada
112	Banten	Kasemen	Kota Serang	Banten	2,29	Siaga
113	Kapuren	Walantaka	Kota Serang	Banten	1,72	Waspada
114	Banjarsari	Cipocok Jaya	Kota Serang	Banten	1,77	Waspada
115	Pondok Aren	Pondok Aren	Kota Tangerang Selatan	Banten	2,16	Siaga
116	Bumijo	Jetis	Kota Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	2,25	Siaga
117	Gowongan	Jetis	Kota Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	1,79	Waspada
118	Bausasran	Danurejan	Kota Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	1,92	Waspada
119	Jabonmekar	Parung	Kab. Bogor	Jawa Barat	2,04	Waspada
120	Ujunggenteng	Ciracap	Kab. Sukabumi	Jawa Barat	1,83	Waspada
121	Pakuwon	Garut Kota	Kab. Garut	Jawa Barat	2,09	Waspada
122	Haurgeulis	Haurgeulis	Kab. Indramayu	Jawa Barat	1,97	Waspada
123	Patimban	Pusakanagara	Kab. Subang	Jawa Barat	2,18	Siaga
124	Pasirjaya	Cilamaya Kulon	Kab. Karawang	Jawa Barat	2,16	Siaga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
125	Batukaras	Cijulang	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	1,73	Waspada
126	Kebon Gedang	Batununggal	Kota Bandung	Jawa Barat	1,76	Waspada
127	Babakan Surabaya	Kiaracondong	Kota Bandung	Jawa Barat	2,13	Siaga
128	Tanah Baru	Beji	Kota Depok	Jawa Barat	2,16	Siaga
129	Cimahi	Cimahi Tengah	Kota Cimahi	Jawa Barat	1,88	Waspada
130	Adiraja	Adipala	Kab. Cilacap	Jawa Tengah	2,22	Siaga
131	Karangkemiri	Jeruklegi	Kab. Cilacap	Jawa Tengah	2,20	Siaga
132	Mojosongo	Jebres	Kota Surakarta	Jawa Tengah	1,89	Waspada
133	Tanjung Mas	Semarang Utara	Kota Semarang	Jawa Tengah	2,04	Waspada
134	Kaligawe	Gayamsari	Kota Semarang	Jawa Tengah	1,96	Waspada
135	Purwoyoso	Ngaliyan	Kota Semarang	Jawa Tengah	1,93	Waspada
136	Malasan	Durenan	Kab. Trenggalek	Jawa Timur	2,00	Waspada
137	Rejoagung	Kedungwaru	Kab. Tulungagung	Jawa Timur	1,75	Waspada
138	Kuningan	Kanigoro	Kab. Blitar	Jawa Timur	1,78	Waspada
139	Baye	Kayen Kidul	Kab. Kediri	Jawa Timur	1,94	Waspada
140	Kemiri	Kepanjen	Kab. Malang	Jawa Timur	2,11	Siaga
141	Rowokangkung	Rowokangkung	Kab. Lumajang	Jawa Timur	2,12	Siaga
142	Wonosunyo	Gempol	Kab. Pasuruan	Jawa Timur	1,80	Waspada
143	Kersikan	Bangil	Kab. Pasuruan	Jawa Timur	1,63	Waspada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
144	Mojoparon	Rembang	Kab. Pasuruan	Jawa Timur	1,83	Waspada
145	Tebel	Gedangan	Kab. Sidoarjo	Jawa Timur	2,06	Waspada
146	Margopatut	Sawahan	Kab. Nganjuk	Jawa Timur	1,86	Waspada
147	Kauman	Bojonegoro	Kab. Bojonegoro	Jawa Timur	2,01	Waspada
148	Tegalagung	Semanding	Kab. Tuban	Jawa Timur	2,05	Waspada
149	Banjarsari	Cerme	Kab. Gresik	Jawa Timur	1,85	Waspada
150	Pandan	Galis	Kab. Pamekasan	Jawa Timur	1,90	Waspada
151	Pangbatok	Proppo	Kab. Pamekasan	Jawa Timur	2,16	Siaga
152	Tanjung	Saronggi	Kab. Sumenep	Jawa Timur	1,92	Waspada
153	Saronggi	Saronggi	Kab. Sumenep	Jawa Timur	1,97	Waspada
154	Mrican	Mojoroto	Kota Kediri	Jawa Timur	1,93	Waspada
155	Ketawanggede	Lowokwaru	Kota Malang	Jawa Timur	1,90	Waspada
156	Mentikan	Prajuritkulon	Kota Mojokerto	Jawa Timur	1,82	Waspada
157	Balongsari	Tandes	Kota Surabaya	Jawa Timur	2,18	Siaga
158	Sidotopo	Semampir	Kota Surabaya	Jawa Timur	2,31	Siaga
159	Ngaglik	Batu	Kota Batu	Jawa Timur	2,10	Siaga
160	Bulukerto	Bumiaji	Kota Batu	Jawa Timur	2,25	Siaga
161	Balai Karang	Sekayam	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	1,76	Waspada
162	Bungkang	Sekayam	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	1,88	Waspada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
163	Entikong	Entikong	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	1,63	Waspada
164	Sungai Deras	Teluk Pakedai	Kab. Kubu Raya	Kalimantan Barat	2,18	Siaga
165	Dalambugis	Pontianak Timur	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	2,05	Waspada
166	Batulayang	Pontianak Utara	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	1,50	Bahaya
167	Kertak Hanyar I	Kertak Hanyar	Kab. Banjar	Kalimantan Selatan	1,71	Waspada
168	Gambah Luar Muka	Kandangan	Kab. Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	2,11	Siaga
169	Kuripan	Banjarmasin Timur	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	1,56	Bahaya
170	Pelambuan	Banjarmasin Barat	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	1,65	Waspada
171	Telaga Biru	Banjarmasin Barat	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	1,76	Waspada
172	Alalak Selatan	Banjarmasin Utara	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	1,72	Waspada
173	Kelayan Luar	Banjarmasin Tengah	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	1,63	Waspada
174	Candi	Kumai	Kab. Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	2,05	Waspada
175	Tumbang Tariak	Kurun	Kab. Gunung Mas	Kalimantan Tengah	1,90	Waspada
176	Tumbang Nusa	Jabiren	Kab. Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	1,66	Waspada
177	Pahandut	Pahandut	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	2,15	Siaga
178	Sei Gohong	Bukit Batu	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	2,03	Waspada
179	Bereng Bengkel	Sabangau	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	1,78	Waspada
180	Baru Tengah	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	2,10	Siaga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
181	Tenun Samarinda	Samarinda Seberang	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	1,98	Waspada
182	Pelita	Samarinda Ilir	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	1,96	Waspada
183	Sungai Pinang Dalam	Sungai Pinang	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	1,87	Waspada
184	Lok Tuan	Bontang Utara	Kota Bontang	Kalimantan Timur	2,09	Waspada
185	Baru Ilir	Balikpapan Barat	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	2,13	Siaga
186	Tideng Pale Timur	Sesayap	Kab. Tana Tidung	Kalimantan Utara	-	Tidak Terdefinisi
187	Sambungan Selatan	Tana Lia	Kab. Tana Tidung	Kalimantan Utara	-	Tidak Terdefinisi
188	Bebakung	Betayau	Kab. Tana Tidung	Kalimantan Utara	-	Tidak Terdefinisi
189	Kapuak	Muruk Rian	Kab. Tana Tidung	Kalimantan Utara	-	Tidak Terdefinisi
190	Karang Anyar	Tarakan Barat	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	1,91	Waspada
191	Karang Rejo	Tarakan Barat	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	1,86	Waspada
192	Karang Anyar Pantai	Tarakan Barat	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	2,02	Waspada
193	Sebengkong	Tarakan Tengah	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	2,12	Siaga
194	Selumit Pantai	Tarakan Tengah	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	2,08	Waspada
195	Lingkas Ujung	Tarakan Timur	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	1,57	Bahaya
196	Juata Laut	Tarakan Utara	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	1,70	Waspada
197	Juata Permai	Tarakan Utara	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	1,93	Waspada
198	Juata Kerikil	Tarakan Utara	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	1,70	Waspada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
199	Bambu	Mamuju	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	1,90	Waspada
200	Karema	Mamuju	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	2,12	Siaga
201	Simboro	Simboro dan KEP.	Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	1,88	Waspada
202	Tinambung	Tinambung	Kab. Polewali Mandar	Sulawesi Barat	1,60	Waspada
203	Karama	Tinambung	Kab. Polewali Mandar	Sulawesi Barat	1,91	Waspada
204	Sidodadi	Wonomulyo	Kab. Polewali Mandar	Sulawesi Barat	1,76	Waspada
205	Ugibaru	Mapilli	Kab. Polewali Mandar	Sulawesi Barat	1,75	Waspada
206	Tamanggalle	Balanipa	Kab. Polewali Mandar	Sulawesi Barat	1,77	Waspada
207	Jenetaesa	Simbang	Kab. Maros	Sulawesi Selatan	2,14	Siaga
208	Batusura'	Rembon	Kab. Tana Toraja	Sulawesi Selatan	2,15	Siaga
209	Rembon	Rembon	Kab. Tana Toraja	Sulawesi Selatan	1,97	Waspada
210	Pondingao'	Masanda	Kab. Tana Toraja	Sulawesi Selatan	1,81	Waspada
211	Bara Baraya	Makassar	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	1,82	Waspada
212	Maccini Gusung	Makassar	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	1,93	Waspada
213	Rappokalling	Tallo	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	1,83	Waspada
214	Lembo	Tallo	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	1,99	Waspada
215	Paropo	Panakkukang	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	1,93	Waspada
216	Tanjung Merdeka	Tamalate	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	1,66	Waspada
217	Pattene	Wara Utara	Kota Palopo	Sulawesi Selatan	1,83	Waspada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
218	Salotellue	Wara Timur	Kota Palopo	Sulawesi Selatan	2,11	Siaga
219	Koburu	Bungku Selatan	Kab. Morowali	Sulawesi Tengah	1,66	Waspada
220	Mpanau	Sigi Biromaru	Kab. Sigi	Sulawesi Tengah	1,80	Waspada
221	Kotarindau	Dolo	Kab. Sigi	Sulawesi Tengah	1,73	Waspada
222	Uepakatu	Mamosalato	Kab. Morowali Utara	Sulawesi Tengah	1,57	Bahaya
223	Kayumalue Ngapa	Palu Utara	Kota Palu	Sulawesi Tengah	1,89	Waspada
224	Kayumalue Pajeko	Palu Utara	Kota Palu	Sulawesi Tengah	1,70	Waspada
225	Kawatuna	Mantikulore	Kota Palu	Sulawesi Tengah	1,83	Waspada
226	Ulu Wolo	Wolo	Kab. Kolaka	Sulawesi Tenggara	1,80	Waspada
227	Bumi Laperio	Kulisusu Barat	Kab. Buton Utara	Sulawesi Tenggara	1,66	Waspada
228	Lanosangia	Kulisusu Utara	Kab. Buton Utara	Sulawesi Tenggara	1,25	Bahaya
229	Langaro Bajo	Wawonii Barat	Kab. Konawe Kep.	Sulawesi Tenggara	1,73	Waspada
230	Lebo	Wawonii Timur	Kab. Konawe Kep.	Sulawesi Tenggara	1,52	Bahaya
231	Gunung Jati	Kendari	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	2,07	Waspada
232	Kampung Salo	Kendari	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	2,01	Waspada
233	Nambo	Nambo	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	2,16	Siaga
234	Ayong	Sang Tombolang	Kab. Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	1,46	Bahaya
235	Buntalo Timur	Lolak	Kab. Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	1,56	Bahaya
236	Otam	Passi Barat	Kab. Bolaang	Sulawesi Utara	2,16	Siaga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
			Mongondow			
237	Otam Barat	Passi Barat	Kab. Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	2,30	Siaga
238	Poopo Selatan	Passi Timur	Kab. Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	1,64	Waspada
239	Pusian Selatan	Dumoga	Kab. Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	1,59	Bahaya
240	Konarom	Dumoga Tenggara	Kab. Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	1,79	Waspada
241	Sindulang Satu	Tuminiting	Kota Manado	Sulawesi Utara	1,85	Waspada
242	Kombos Timur	Singkil	Kota Manado	Sulawesi Utara	1,30	Bahaya
243	Dutulanaa	Limboto	Kab. Gorontalo	Gorontalo	2,01	Waspada
244	Pauwo	Kabila	Kab. Bone Bolango	Gorontalo	1,58	Bahaya
245	Tulabolo	Suwawa Timur	Kab. Bone Bolango	Gorontalo	1,63	Waspada
246	Ilangata	Anggrek	Kab. Gorontalo Utara	Gorontalo	1,78	Waspada
247	Biawu	Kota Selatan	Kota Gorontalo	Gorontalo	2,11	Siaga
248	Limba B	Kota Selatan	Kota Gorontalo	Gorontalo	1,82	Waspada
249	Pohe	Hulonthalangi	Kota Gorontalo	Gorontalo	1,77	Waspada
250	Siendeng	Hulonthalangi	Kota Gorontalo	Gorontalo	1,91	Waspada
251	Tuban	Kuta	Kab. Badung	Bali	2,09	Waspada
252	Kuta	Kuta	Kab. Badung	Bali	1,88	Waspada
253	Dalung	Kuta Utara	Kab. Badung	Bali	1,82	Waspada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
254	Semarapura Kelod	Klungkung	Kab. Klungkung	Bali	1,99	Waspada
255	Sumerta Kelod	Denpasar Timur	Kota Denpasar	Bali	2,03	Waspada
256	Pemecutan Kaja	Denpasar Utara	Kota Denpasar	Bali	1,90	Waspada
257	Ubung Kaja	Denpasar Utara	Kota Denpasar	Bali	2,15	Siaga
258	Beleka	Praya Timur	Kab. Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	1,76	Waspada
259	Lekong	Alas Barat	Kab. Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	1,99	Waspada
260	Tumpu	Bolo	Kab. Bima	Nusa Tenggara Barat	1,77	Waspada
261	Banjar	Taliwang	Kab. Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat	1,81	Waspada
262	Benete	Maluk	Kab. Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat	1,88	Waspada
263	Abian Tubuh Baru	Sandubaya	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat	2,13	Siaga
264	Mandalika	Sandubaya	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat	2,14	Siaga
265	Silawan	Tasifeto Timur	Kab. Belu	Nusa Tenggara Timur	1,88	Waspada
266	Oesapa	Kelapa Lima	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	1,90	Waspada
267	Fatululi	Oebobo	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	2,11	Siaga
268	Tuak Daun Merah	Oebobo	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	1,54	Bahaya
269	Tehoru	Tehoru	Kab. Maluku Tengah	Maluku	1,78	Waspada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2025

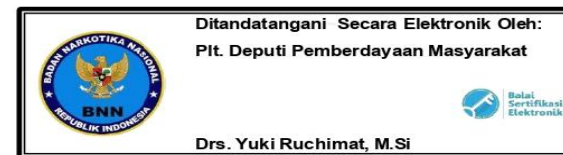
NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
270	Langgur	Kei Kecil	Kab. Maluku Tenggara	Maluku	1,68	Waspada
271	Namlea	Namlea	Kab. Buru	Maluku	1,81	Waspada
272	Hualoy	Amalatu	Kab. Seram Bagian Barat	Maluku	1,72	Waspada
273	Fatmite	Namrole	Kab. Buru Selatan	Maluku	1,72	Waspada
274	Kamlanglale	Namrole	Kab. Buru Selatan	Maluku	1,63	Waspada
275	Waihaong	Nusaniwe	Kota Ambon	Maluku	2,09	Waspada
276	Galala	Sirimau	Kota Ambon	Maluku	1,94	Waspada
277	Batu Merah	Sirimau	Kota Ambon	Maluku	1,94	Waspada
278	Tihu	Teluk Ambon	Kota Ambon	Maluku	1,74	Waspada
279	Taar	Pulau Dullah Selatan	Kota Tual	Maluku	1,85	Waspada
280	Soa-Sio	Galela	Kab. Halmahera Utara	Maluku Utara	2,05	Waspada
281	Kalumata	Kota Ternate Selatan	Kota Ternate	Maluku Utara	1,94	Waspada
282	Jati	Kota Ternate Selatan	Kota Ternate	Maluku Utara	1,94	Waspada
283	Tabona	Kota Ternate Selatan	Kota Ternate	Maluku Utara	1,95	Waspada
284	Salero	Kota Ternate Utara	Kota Ternate	Maluku Utara	1,83	Waspada
285	Marikurubu	Kota Ternate Tengah	Kota Ternate	Maluku Utara	1,64	Waspada
286	Gamtufkange	Tidore	Kota Tidore Kep.	Maluku Utara	2,04	Waspada
287	Indonesiana	Tidore	Kota Tidore Kep.	Maluku Utara	1,96	Waspada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/5070/XII/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2025

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	HASIL INDEKS	STATUS
1	2	3	4	5	6	7
288	Tomagoba	Tidore	Kota Tidore Kep.	Maluku Utara	1,95	Waspada
289	Tuguwaji	Tidore	Kota Tidore Kep.	Maluku Utara	2,17	Siaga
290	Gurabati	Tidore Selatan	Kota Tidore Kep.	Maluku Utara	2,03	Waspada
291	Rum	Tidore Utara	Kota Tidore Kep.	Maluku Utara	1,70	Waspada
292	Manokwari Barat	Manokwari Barat	Kab. Manokwari	Papua Barat	1,60	Bahaya
293	Sanggeng	Manokwari Barat	Kab. Manokwari	Papua Barat	1,25	Bahaya
294	Wosi	Manokwari Barat	Kab. Manokwari	Papua Barat	1,76	Waspada
295	Amban	Manokwari Barat	Kab. Manokwari	Papua Barat	1,47	Bahaya
296	Padarni	Manokwari Barat	Kab. Manokwari	Papua Barat	2,02	Waspada
297	Sowi	Manokwari Selatan	Kab. Manokwari	Papua Barat	1,92	Waspada
298	Nendali	Sentani Timur	Kab. Jayapura	Papua	1,74	Waspada
299	Kadun Jaya	Wania	Kab. Mimika	Papua	1,73	Waspada
300	Argapura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	Papua	2,18	Siaga
301	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	Papua	1,86	Waspada

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.